

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *GOOD GOVERNANCE* DI
SEKOLAH**

(Studi Kasus pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon)



Oleh :

Muhamad Sidqi Naufal

16312354

**PROGRAM STUDI (S1) AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GOOD GOVERNANCE

DI SEKOLAH

(Studi Kasus pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai

derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan

Ekonomika UII

Oleh:

Muhamad Sidqi Naufal

16312354

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudiann hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 28 April 2020

Penulis,



(Muhamad Sidqi Naufal)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *GOOD GOVERNANCE* DI
SEKOLAH
(Studi Kasus pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Muhamad Sidqi Naufal

No.Mahasiswa: 16312354

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 28 April 2020

Dosen Pembimbing,



Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GOOD GOVERNANCE DI SEKOLAH:
STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA CIREBON**

Disusun Oleh : **MUHAMAD SIDQI NAUFAL**

Nomor Mahasiswa : **16312354**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 15 Juni 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D.

Penguji : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhannallahuwata'ala yang telah menganugerahkan segala kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya yang tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Shalawat serta salam tidak lupa juga tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjauhkan kita dari jaman jahiliyah menjadi jaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Good Governance* di Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon)** telah selesai disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, dan dukung dari banyak pihak yang berkontribusi. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Allah Subhanallahuwata'ala yang telah menganugerahkan segala kemurahan rezeki dan menganugerahkan segala kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, dan semoga skripsi ini bisa menjadi amal ibadah di akhirat kelak.
2. Kedua Orangtua saya yaitu Bapak Udin Ihsanudin dan Ibu Herawati yang telah memberikan dukungan, motivasi dan juga do'a yang luar

biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan membalasnya di dunia maupun di akhirat. Allahuma aamiin.

3. Kepada adik saya Humaira Zahra Ihwati yang selalu memberikan semangat dan juga do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana., S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E.,M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si.,Ak. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Arief Rahman,,S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau dan keluarga.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat.

10. Pihak sekolah menengah negeri Kota Cirebon khususnya komite sekolah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi objek penelitian dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
11. Untuk Sarofa Pujarama yang telah rela menghabiskan waktunya bersama penulis dan menjadi penyemangat dan teman cerita bagi penulis sejak pertama masuk kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Kawan-kawan penghuni Kos Aminers yang telah menjadi sahabat saya semasa kuliah di Yogyakarta, terima kasih telah menjadi bagian cerita masa-masa kuliah.
13. Kawan-kawan *Entrepreneur Community* yang telah banyak mengajarkan saya berbagai ilmu baik *softskill* maupun *hardskill* dan pengalaman berorganisasi.
14. Kawan-kawan SMA, yang senantiasa menghibur dan menemani dikala jenuh: Ade Nurohman, Fandi Teguh Prasetyo, Khoirul Azmi dan Naufal Wibowo. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
15. Kawan-kawan KKN Desa Rangkah khususnya unit 98 yang selalu menghibur dan menjadi teman bercerita selama penyusunan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	9
1.3. TUJUAN PENELITIAN	9
1.4. MANFAAT PENELITIAN	9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. LANDASAN TEORI	12
2.1.1 <i>Teori Agensi</i>	12
2.2.1 <i>Good Governance</i>	14
2.2.1.1. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	16
2.2.1.2. Tujuan <i>Good Governance</i>	18
2.2. PENGERTIAN VARIABEL	20
2.2.1 <i>Transparansi Sekolah</i>	20
2.2.2 <i>Kualitas Laporan Keuangan</i>	21
2.2.3 <i>Komite sekolah</i>	22
2.2.3.1 Pengertian Komite sekolah	22
2.2.3.2 Tugas Komite sekolah	23
2.2.3.3 Peran dan Fungsi Komite sekolah	23
2.2.3.4 Struktur Komite sekolah	25
2.2.4 <i>Kualitas Komite sekolah</i>	25
2.2.5 <i>Partisipasi Komite sekolah</i>	26
2.3. PENELITIAN TERDAHULU	27
2.4. HIPOTESIS	33
2.4.1. <i>Pengaruh Transparansi Sekolah terhadap Good Governance Sekolah</i>	33
2.4.2. <i>Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Good Governance Sekolah</i>	34
2.4.3. <i>Pengaruh Kualitas Komite sekolah terhadap Good Governance Sekolah</i>	36

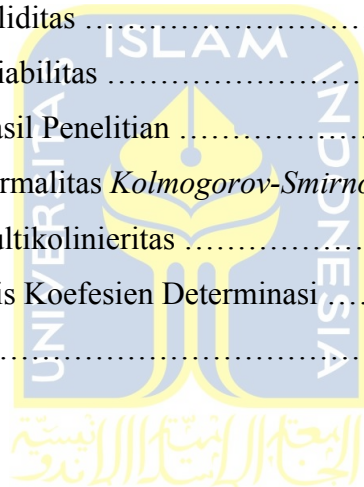
2.4.4. Pengaruh Partisipasi Komite sekolah terhadap Good Governance Sekolah	
37	
2.5. KERANGKA KONSEP PENELITIAN	40
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
3.1. POPULASI, TEKNIK SAMPLING DAN SAMPEL PENELITIAN	41
3.1.1. Populasi	41
3.1.2. Teknik Sampling	41
3.1.3. Sampel Penelitian	44
3.2. DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN	45
3.2.1. Transparansi Sekolah	45
3.2.2. Kualitas Laporan Keuangan	47
3.2.3. Kualitas Komite sekolah	48
3.2.4. Partisipasi Komite sekolah	50
3.2.1. Good Governance	51
3.3. METODE PENGUMPULAN DATA	53
3.4. METODE ANALISIS DATA	53
3.5. UJI KUALITAS DATA	54
3.5.1. Uji Validitas	54
3.5.2. Uji Reliabilitas	55
3.6. UJI ASUMSI KLASIK	55
3.6.1. Uji Normalitas	55
3.6.2. Uji Heteroskedastistas	56
3.6.3. Uji Multikolinieritas	56
3.7. PENGUJIAN HIPOTESA	56
3.7.1. Koefisien Determinasi	56
3.7.2. Uji T	57
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1. DESKRIPSI DATA	58
4.1.1. Karakteristik Penelitian	58
4.1.2. Karakteristik Responden	58
4.2. ANALISIS DATA	59
4.2.1. Uji Kualitas Data	59
4.2.1.1. Uji Validitas	60
4.2.1.2. Uji Reliabilitas	61
4.3. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	61
4.4. UJI ASUMSI KLASIK	63
4.4.1. Uji Normalitas	63
4.4.2. Uji Multikolinieritas	64
4.4.3. Uji Heteroskedastistas	65
4.5. PENGUJIAN HIPOTESIS	66
4.5.1. Koefisien Determinasi	66
4.5.2. Uji t	67
4.6. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	69
4.6.1. Pengaruh Transparansi Sekolah Terhadap Good Governance	69
4.6.2. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Good Governance	71
4.6.3. Pengaruh Kualitas Komite sekolah Terhadap Good Governance	73

4.6.4. Pengaruh Partisipasi Komite sekolah Terhadap Good Governance.....	74
4.6.1. Keterbatasan Penelitian	76
BAB V	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. KESIMPULAN.....	78
5.2. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	91



DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian Terdahulu	30
3.1. Populasi SMPN dan SMAN di Kota Cirebon	41
3.2 Tabel Hasil <i>Cluster Sampling</i>	43
3.3 Kuisisioner Transparansi Sekolah	46
3.4 Kuisisioner Kualitas Laporan Keuangan	47
3.5 Kuisisioner Kualitas Komite Sekolah	49
3.6 Kuisisioner Partisipasi Komite Sekolah	51
3.7 Kuisisioner <i>Good Governance</i>	52
Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Responden Penelitian	58
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas	60
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.4. Deskripsi Hasil Penelitian	62
Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	64
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4.7. Hasil Analisis Koefesien Determinasi	66
Tabel 4.8. Hasil Uji t	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	39
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65



DAFTAR LAMPIRAN

Kuisisioner Penelitian	90
Data Penelitian	96
Hasil Uji Instrumen	104
Hasil Analisis Data	111
Surat Izin Penelitian	114



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance* sekolah menengah negeri di Kota Cirebon. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer dengan metode survey dengan kuisioner kepada komite sekolah sebagai responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon yang berjumlah 27 sekolah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi sekolah, kualitas laporan keuangan, kualitas komite sekolah dan partisipasi komite sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *good governance* sekolah. Kemampuan memprediksi dari keempat variabel tersebut adalah sebesar 69,9 persen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 30,1 persen dijelaskan pada variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata kunci : *Good Governance*, Transparansi Sekolah, Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Komite Sekolah, Partisipasi Komite Sekolah.

ABSTRACT

The objective of the research was to analyze the factors of state high school's good governance in Cirebon. Primary data were gathered by conducting a survey by distributing questionnaires to the school committee as the respondents and analyzed by using multiple linear regression analysis. The population was 27 state high schools in Cirebon. The result of the research showed that school's transparency, quality of financial statement, quality of school committee, and participation of school committee had positive and significant influence on school's good governance. The predicting capacity of the four variables toward school's good governance in Cirebon was 69,9%. While the remaining 30,1% was explained the other variables exclude from the research.

Keywords : Good Governance, School's Transparency, Quality of Financial Statement, Quality of School Committee, and Participation of School Committee

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan *good governance* merupakan salah satu isu nasional yang sedang dilangsungkan pemerintah saat ini (Herawan, 2008). Di Indonesia kampanye *good governance* tersebut sejak 1998 semakin gencar dilakukan seiring dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun tersebut (Zuhro, 2010). Upaya-upaya untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia sudah dilakukan, antara lain dalam wujud Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu dalam UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, dimuat asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi:

- (1) asas kepastian hukum;
- (2) asas tertib penyelenggaraan negara;
- (3) asas kepentingan umum;
- (4) asas keterbukaan;
- (5) asas proporsionalitas;
- (6) asas profesionalitas; dan
- (7) asas akuntabilitas.

Selain itu penyelenggaraan negara dengan dasar *good governance* telah diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Asas umum penyelenggaraan negara tersebut yaitu; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas.

Menurut Permadi (2018) salah satu upaya juga untuk mengembangkan *good governance* yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, dimulai dari tingkat individu, meningkat kepada kelompok, dan kemudian menuju pada inovasi organisasional. Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses *good governance*. Terdapat pula Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang disusun dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain peraturan dan perundang-undangan di atas KPK (2016) dalam “Modul Materi *Good Governance* dan Pelayanan Publik” menyebutkan bahwa pada tahun 2011 pemerintah memprakarsai lahirnya *Open Government Indonesia* (OGI) yang merupakan gerakan yang memiliki tujuan membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan inovatif.

Lebih jauh dalam penerapan *good governance*, upaya penerapan *good governance* di lingkungan sekolah sebenarnya juga telah dilakukan, yaitu dengan adanya Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terkait pengelolaan dana sekolah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 79 yang menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pada level implementasi di lingkungan sekolah, diduga hal ini masih jauh dari harapan. Bahkan ada sinyal elemen praktek-praktek yang salah berlangsung dalam penyelenggaraan sekolah (Herawan, 2008).

Idealnya, pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh kepala sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah (Lestari, 2018). Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan (Sutedjo, 2009). Penyusunan laporan keuangan bagi suatu lembaga atau organisasi nirlaba ini telah diatur dalam PSAK Nomor. 45. Sebagaimana tertulis dalam PSAK Nomor 45, bahwa organisasi nirlaba salah satunya sekolah perlu menyusun setidaknya empat jenis laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan,

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan posisi keuangan (Arofah dan Rahmawati, 2017). Sedangkan khusus bagi sekolah negeri, karena merupakan bagian dari lembaga pemerintah, laporan dan pertanggungjawaban kegiatan berupa laporan pelaksanaan anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Suryana (2009) mengatakan dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan yaitu

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS
- (2) Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada
- (3) Kuitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain
- (4) Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

Dalam rangka penerapan mekanisme pengawasan di lingkungan sekolah, menurut Permendikbud No. 75 Tahun 2016, perlu dibentuk komite sekolah. Safitri dkk. (2018) mengungkapkan bahwa kepala sekolah seharusnya mampu menjalin kerja sama yang baik dengan para orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 3 menjelaskan bahwa

tugas komite sekolah adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Oleh karena itu, komite sekolah adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) penting dalam kaitannya dengan penerapan *good governance* di lingkungan sekolah. Tetapi, Ngisa (2017) menyatakan bahwa pada kenyataannya komite yang merupakan wadah organisasi perwakilan dari masyarakat, sebagai lembaga otonom menunjukkan indikasi kurang berfungsi sesuai dengan perannya yang telah ditentukan dan hanya berfungsi saat adanya bantuan dari pemerintah dan input (dana), juga adanya indikasi komite sekolah kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Rahman (2014) Secara umum, faktor umum yang menyebabkan masih rendahnya kinerja komite sekolah adalah lemahnya intensitas keterlibatan komite sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sekolah. Di samping itu, pemahaman komite sekolah terhadap tujuan pendidikan yang spesifik serta isu-isu yang berkaitan dengan manajemen fasilitas masih kurang. Sedangkan menurut Muhammad (2019) penyebab masih banyaknya komite sekolah yang belum berperan dengan baik yaitu disebabkan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kapasitas komite sekolah. Padahal ada sekitar Rp. 490 Miliar anggaran belanja pada Dinas Pendidikan tahun 2019. Namun, tidak ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas komite sekolah. Oleh karena itu diperlukannya

pembinaan rutin yang dilakukan oleh bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016.

Jika komite sekolah berperan dengan baik seperti yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tersebut, maka terwujudnya *good governance* pada sekolah akan lebih mudah. Karena sangat penting terwujudnya *good governance* pada sekolah, seperti yang dikatakan oleh Hudson (2007) bahwa implementasi tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan babak baru yang diharapkan dapat meningkatkan mutu, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Selain itu Gallacher (2001) juga berargumen bahwa reformasi pedagogis memang diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan pendidikan, namun kini terdapat hal lain juga yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas dan efisiensi dari pendidikan yaitu bagaimana cara pendidikan tersebut dikelola.

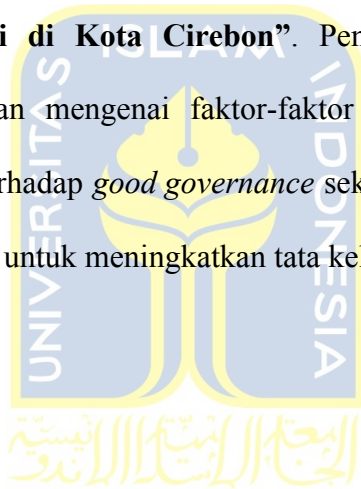
Dalam kaitannya dengan kinerja, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ranson (2011) mengindikasikan bahwa *good governance* sekolah dapat memperkuat kinerja dari sekolah. Penerapan *good governance* di sekolah dapat menjadikan sekolah lebih efektif dalam mencapai standar sekolah. Melalui *good governance* sekolah kepemimpinan menjadi lebih kuat, kebijakan yang diambil tepat, akuntabilitas publik semakin tinggi. Oleh karena itu sangat penting jika *good governance* dalam sekolah dapat diwujudkan.

Sementara ini penelitian mengenai *good governance* banyak dilakukan di instansi pemerintah seperti SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Sedangkan di lingkungan sekolah masih belum banyak yang melakukan penelitian mengenai *good governance*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi dkk. (2016) dimana penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi dan *value for money* terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Lalu terdapat penelitian yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Bali oleh Ayub dkk, (2018) untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan daerah, SPIP, dan SAKIP terhadap *good governance*. Selain itu penelitian ini juga melibatkan komite sekolah sebagai respondennya, dimana komite sekolah merupakan pihak eksternal sehingga penilaian terhadap sekolah akan lebih objektif. Hal ini melengkapi keterbatasan penelitian di sekolah sebelumnya yang dilakukan oleh Ginting (2018) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Sekolah-Sekolah di Kecamatan Medan Tuntungan” Sedangkan penelitian di sekolah yang melibatkan komite sekolah sebagai responden dilakukan oleh Wathon (2016) untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan APBS dan transparansi pengelolaan APBS terhadap partisipasi komite sekolah.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menambah penelitian mengenai *good governance* di lingkungan sekolah. Karena penelitian *good governance* dengan menggunakan variabel yang diambil berdasarkan prinsip

good governance seperti transparansi dan partisipasi masih sangat sedikit dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu dalam penelitian ini juga melibatkan komite sekolah sebagai responden untuk menilai *good governance* sekolah sehingga penilaian lebih objektif.

Karena permasalahan dan pentingnya *good governance* pada sekolah yang telah dipaparkan di atas yang mendorong penulis untuk menulis sebuah kajian ilmiah yang mendalam dengan mengangkat judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Good Governance* di Sekolah: Studi pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon”**. Penelitian ini diharapkan dapat menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang memiliki pengaruh positif terhadap *good governance* sekolah sehingga dapat dijadikan acuan bagi sekolah untuk meningkatkan tata kelolanya.



1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi sekolah berpengaruh terhadap *Good Governance* di sekolah?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap *Good Governance* di sekolah?
3. Apakah kualitas komite sekolah berpengaruh terhadap *Good Governance* di sekolah?
4. Apakah partisipasi komite sekolah berpengaruh terhadap *Good Governance* di sekolah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara transparansi sekolah dengan *Good Governance* di sekolah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kualitas laporan keuangan dengan *Good Governance* di sekolah.
3. Untuk mengetahui apakah kualitas komite sekolah berpengaruh terhadap *Good Governance* di sekolah.
4. Untuk mengetahui apakah partisipasi komite sekolah berpengaruh terhadap *Good Governance* di sekolah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai *Good Governance* terutama di sekolah, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis khususnya mengenai *Good Governance* pada sekolah.

3. Bagi Pembaca

- a) Memberikan wacana alternatif bagi praktisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance* sekolah.
- b) Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, seperti kajian pustaka, serta teori-teori dan pemikiran ahli yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

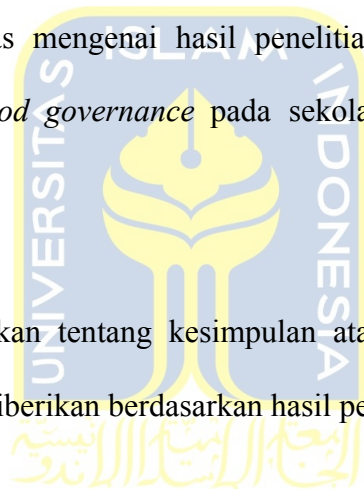
Bab ini menguraikan secara singkat bagaimana metode penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *good governance* pada sekolah menengah negeri di Kota Cirebon.

BAB V :Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang dimana terdapat pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan yang diberikan oleh pihak *principle* atau pemberi kewenangan kepada *agent* atau yang diberi wewenang. Sedangkan menurut Kholmi (2010) definisi tersebut mengandung pengertian bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan telah diberikan oleh pihak pemilik yang merupakan *principle* kepada pihak perusahaan atau organisasi yang merupakan *agent* (Kholmi, 2010). Menurut Scott (1997) mengatakan bahwa inti dari *agency theory* (teori keagenan) adalah perancangan desain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Arifin (2005) menjelaskan adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan, hal ini dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik-menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain. Permasalahan antara *principal* dan *agent* muncul dalam konteks ketika *principal* tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh *agent*, apakah sesuai dengan keinginan *principal* atau tidak (kepentingan *principal*

tidak sama dengan kepentingan *agent*) serta terdapat asimetri informasi (Strom, 2002). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut.

Selanjutnya Zelmianti (2016) menjelaskan bahwa teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara yang demokratis memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Algameta (2016) menjelaskan bahwa *agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal yang merupakan masyarakat.

Di dalam dunia persekolahan yang merupakan salah satu organisasi sektor publik, Rahman (2014) menjelaskan bahwa komite sekolah sebagai tim kerja yang terdiri dari perwakilan *stakeholders* (orang tua murid, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah) berperan sebagai pihak yang mendorong, mempercayakan, dan mengontrol pengelolaan sekolah secara sepenuhnya

dilakukan oleh kepala sekolah dan stafnya. Dalam konteks ini, kepala sekolah dan staf yang berada pada jabatan struktural lainnya merupakan pihak manajemen yang menjalankan operasional sekolah secara transparan, mandiri, profesional, dan komprehensif. Oleh karena itu berdasarkan teori agensi, penyelenggaraan sekolah harus diawasi oleh komite sekolah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sekolah dilakukan dengan baik dan benar.

Dengan adanya teori agensi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa dalam lingkungan sekolah, permasalahan keagenan dapat terjadi diantara komite sekolah dengan manajemen sekolah. Dimana komite sekolah merupakan organisasi yang mewakili masyarakat, seperti yang kita ketahui terdapat andil dari masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan sekolah karena sekolah merupakan organisasi sektor publik. Sehingga untuk menghindari terjadinya permasalahan keagenan harus ada pertanggungjawaban dari pihak manajemen sekolah dan peran yang aktif dari Komite sekolah.

2.2.1 Good Governance

Menurut UNDP (1997) *good governance* terjadi apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut *World Bank* pengertian *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan

legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009). Sedangkan menurut Punyaratabandhu (2004) bahwa *good governance* mengacu pada penyelenggaraan sistem organisasi yang lebih mementingkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat dalam arti yang sangat luas yang dicirikan oleh adanya interaksi antarsistem yang kompleks yang menyangkut fungsi, tradisi, proses, dan struktur sumber daya yang dikarakterisasi oleh tiga kata kunci, yaitu: akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Governance menurut *World Bank* lebih menekankan kepada cara yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan manusia yang digunakan dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan UNDP lebih menekankan *governance* dilihat dari *political governance* bagaimana pembentukan kebijakan, *economic governance* bagaimana proses pembuatan kebijakan ekonomi sehingga memberikan kesejahteraan rakyat dan keadilan, serta *administrative governance* yang merupakan bagaimana pengimplementasian kebijakan (Pangestika, 2016). Menurut OECD (2004) *Good Governance* yaitu sebagai sistem pemberi petunjuk sekaligus pengawas suatu perusahaan maupun organisasi baik itu sektor swasta maupun sector publik.

Berdasarkan beberapa definisi *good governance* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata kelola yang baik, berupa sistem yang mengontrol dan mengatur urusan negara di semua tingkatan, terkait dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu *good governance* juga berorientasi pada kemashlahatan masyarakat,

dengan menjalankan tata kelola yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Dalam konteks sekolah, untuk mencapai *good governance* maka perlu adanya keterlibatan (*participation*) dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) sekolah, yaitu orangtua siswa, masyarakat di sekitar sekolah, dan pihak sekolah itu sendiri. Partisipasi *stakeholder* tersebut diwadahi dalam komite sekolah. Menurut Gann (1998) *school governance* lebih cenderung kepada orientasi bagaimana menjadikan sekolah sebagai lembaga yang dipercaya dan dijadikan rujukan masyarakat dalam mengejawantahkan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab secara aktif dalam pembangunan bangsa dan negara melalui pendidikan.

2.2.1.1. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Good Governance memiliki prinsip-prinsip di dalamnya. *Good governance* akan terselenggara dengan baik ketika prinsip-prinsip di dalamnya dapat diimplementasikan dan dipahami dengan baik. Berikut prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Program* (1997):

1) *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan.

2) *Rule of Law*

Kerangka hukum yang adil dan tidak pandang bulu, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat.

3) *Transparancy*

Kebebasan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4) *Responsiveness*

Kecepatan dan daya tanggap lembaga publik dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

5) *Consensus Orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Tata kelola yang baik harus dapat menjembatani kepentingan-kepentingan publik yang berbeda-beda demi terciptanya suatu konsensus menyeluruh.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

8) *Accountability*

Adanya pertanggungjawaban kepada publik atas segala aktifitas yang telah dilakukan.

9) *Strategic Vision*

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jangka panjang.

Menurut OECD (2004) terdapat empat unsur penting dalam *good governance* yang wajib diimplementasikan dan dipahami dalam suatu

organisasi jika ingin terselenggaranya *good governance* yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Menurut EDB (2010) memaparkan bahwa terdapat beberapa aspek dasar dari *good governance* pada sekolah yaitu:

- 1) Melibatkan partisipasi kolektif dari semua stakeholder dalam manajemen sekolah.
- 2) Membuat dasar yang kuat untuk pengembangan jangka panjang sekolah dimana ini merupakan landasan dari pendidikan yang berkualitas.
- 3) Memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan masyarakat.
- 4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja dari seluruh manajemen administrasi, dimana hal tersebut sangat penting untuk keberlanjutan pengembangan sekolah.
- 5) Meningkatkan kepercayaan orang tua siswa dan masyarakat terhadap sekolah.

2.2.1.2. Tujuan Good Governance

Menurut Agung (2005) tujuan dari diterapkannya *good governance* dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa tujuan dari *Good Governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai- nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 2) Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
- 3) Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 4) Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
- 5) Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

2.2. Pengertian Variabel

2.2.1 Transparansi Sekolah

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Putra, 2014). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Athifah dkk. (2018) transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang.

Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Ginting, 2018). Menurut Muhammad (2007) upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekolah kepada publik yaitu:

- 1) Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak atau elektronik.
- 2) Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi,

bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.

- 3) Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik.
- 4) Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.

2.2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode sebagai gambaran dari kinerja entitas yang bersangkutan (Andriansyah, 2013). Sukhemi (2011) mengatakan bahwa informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan.

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah harus memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Fikrian, 2017).

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 sekolah dalam pertanggungjawabannya harus

- (1) menyusun pembukuan secara lengkap seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), buku kas umum, buku pembantu kas,

buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen pendukung lainnya

- (2) melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos sekolah yang ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah.

Pertanggungjawaban tersebut harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu selain laporan keuangan, hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan tersebut juga harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.2.3 Komite sekolah

2.2.3.1 Pengertian Komite sekolah

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Misbah, 2009). Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama (Megiati, 2016). Hasbullah (2007) menjelaskan bahwa komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau dapat karena pertimbangan lainnya.

2.2.3.2 Tugas Komite sekolah

Komite sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah (Misbah, 2009). Menurut Kemendikbud (2017) bahwa dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.

2.2.3.3 Peran dan Fungsi Komite sekolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 keberadaan Komite sekolah dapat berperan sebagai berikut:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran,

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sedangkan fungsi dari Komite sekolah itu sendiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan.
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
 - d. Kriteria tenaga pendidikan.
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan.

- f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
 - 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

2.2.3.4 Struktur Komite sekolah

Hasbullah (2007) memaparkan bahwa anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa, sebanyak-banyaknya berjumlah tiga (3) orang. Dan jumlah anggota Komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan (9) orang dan jumlahnya harus ganjil. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite sekolah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD / ART yang sekurang-kurangnya terdiri dari atas seorang ketua, sekretaris dan bendahara (Larasati, 2009).

2.2.4 Kualitas Komite sekolah

Menurut Ditjen Dikdasmen Depdiknas (2007) bahwa komponen dan indikator kinerja komite sekolah terkait pada peran yang dilakukannya, yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator*

agency). Menurut Zulkifli (2015) untuk menjadi komite sekolah, dibutuhkan kualifikasi tertentu agar seseorang dapat menjadi anggota komite sekolah yaitu sebagai berikut:

- 1) Amanah, artinya seorang anggota komite sekolah harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas hal-hal yang diperbuatnya.
- 2) Profesional, artinya seorang anggota komite sekolah harus memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Mau beramal, artinya seorang anggota komite sekolah harus mau dan siap untuk beramal bagi kemajuan sekolah. Apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah apalagi yang bersifat darurat/mendesak harus siap ditanggung oleh komite sekolah.
- 4) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pendidikan, artinya seorang anggota komite sekolah harus senantiasa fokus terhadap kemajuan pendidikan dimana ia menjadi anggota komite sekolah. Hal-hal yang menjadi hambatan harus dapat diubah menjadi tantangan.

2.2.5 Partisipasi Komite sekolah

Adapun esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia dan meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah (Megiati, 2016). Menurut Susanto (2007) partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan mencakup tiga hal, yaitu:

- (a) keterlibatan dalam perencanaan pendidikan,
- (b) keterlibatan dan pelaksanaan pendidikan, serta
- (c) keterlibatan dalam evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Iswahyudi dkk. (2016) menguji pengaruh pemahaman akuntabilitas, pemahaman transparansi, pemahaman partisipasi masyarakat terhadap *good governance*, dan pemahaman *Value for Money* (VFM) terhadap *good governance* di SKPD Kabupaten Lumajang yang terkait dengan pelayanan publik. Variabel transparansi berpengaruh secara positif terhadap *good governance*. Penelitian mengenai transparansi selanjutnya yang dilakukan oleh Ginting (2018) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Sekolah-Sekolah di Kecamatan Medan” menunjukkan bahwa variabel transparansi penyelenggaraan sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sekolah. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Budiasni dkk. (2017) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi Jiwa Studi Kasus di AJB Bumiputera 1912 Cabang Singaraja” menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Jitmau dkk. (2017) yang meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten

Sorong yang menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sorong.

Terdapat penelitian yang dilakukan Ardiansyah (2013) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap *Good Government Governance* Kota Bandung (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat)”. Berdasarkan penelitian ini Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Good Government Governance* Kota Bandung.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2014) yang berjudul “*The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government Governance Research on Local Government Indonesia*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah fungsi audit intern memiliki efek positif pada kualitas pelaporan keuangan. Fungsi audit intern memiliki efek positif tentang Pemerintahan Pemerintah Baik. Dan, Kualitas pelaporan keuangan memiliki efek positif tentang tata Pemerintahan yang Baik. Penelitian terkait kualitas laporan keuangan selanjutnya dilakukan oleh Fikrian (2017) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nugraheni (2019) yang berjudul “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan

Implikasinya pada *Good Government Governance* di Pemerintah Kabupaten Klaten” yang menunjukkan hasil bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *good government governance*. Hasil ini menunjukan bahwa semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin baik pula tata kelola pemerintah (*good government governance*).

Penelitian selanjutnya terkait variabel komite sekolah dilakukan oleh Rohayati dkk. (2015) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat” hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran komite sekolah terhadap kinerja guru. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Purwandari (2011) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Batang” hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan peran komite sekolah terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Penelitian selanjutnya mengenai variabel partisipasi komite sekolah dilakukan oleh Wathon (2016) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi

komite sekolah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS).

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayub dkk. (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Good Governance* Pada Pemerintah Provinsi Bali”. Penelitian tersebut menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, SPIP, SAKIP, dan *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, SPIP, SAKIP juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Governance*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil	Lokasi
Iswahyudi, Triyuwono, Achsin	2016	Variabel Dependen: <i>Good Governance</i> Variabel Independen: Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan <i>Value for Money</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif, variabel VFM tidak berpengaruh secara positif. Sedangkan variabel partisipasi berpengaruh secara negatif dan variabel transparansi berpengaruh secara positif terhadap <i>good governance</i> .	SKPD di Kabupaten Lumajang

Rahmatika	2014	Variabel: Fungsi audit intern, kualitas pelaporan keuangan dan <i>Good Government Governance</i>	Hasilnya menunjukkan fungsi audit intern memiliki efek positif pada kualitas pelaporan keuangan. Fungsi audit intern memiliki efek positif tentang Pemerintahan Pemerintah Baik. Dan, Kualitas pelaporan keuangan memiliki efek positif tentang tata Pemerintahan yang Baik.	Tujuh SKPD di Pekalongan
Ayub, Utama, Wardana	2018	Variabel Dependen: <i>Good Governance</i> Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah, SPIP, SAKIP	Hasil penelitian menunjukkan, variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, SPIP, SAKIP juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> .	Pemerintah Provinsi Bali
Wathon	2016	Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan	Partisipasi Komite sekolah berpengaruh	Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan

		APBS dan Transparansi Pengelolaan APBS Variabel Independen: Partisipasi Komite sekolah	positif terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBS.	Kalibiru Kabupaten Banyuwangi
Ginting	2018	Variabel Dependen: Akuntabilitas Keuangan Sekolah Variabel Independen: Transparansi Penyelenggara Sekolah, Standar Kinerja dan Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi penyelenggara sekolah, standar kinerja, partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sekolah.	Sekolah- Sekolah di Kecamatan Medan Tuntungan
Nugraheni	2019	Variabel <i>Exogenous</i> : Kompetensi Aparatur, Pengendalian Internal. Variabel <i>Endogenous</i> : Kualitas Laporan Keuangan dan <i>Good Government Governance</i>	hasil bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal memiliki pengaruh positif	Pemerintah Kabupaten Klaten

			signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap good government governance	
--	--	--	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas yaitu terkait variabel *good governance* yang biasanya dilakukan di instansi pemerintah, namun pada penelitian ini dilakukan di sekolah menengah negeri. Selain itu penelitian menambahkan dua variabel baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan dalam penelitian *good governance* di lingkungan sekolah yaitu variabel kualitas laporan keuangan dan kualitas komite sekolah.

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Transparansi Sekolah terhadap *Good Governance*

Sekolah

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan yang diberikan oleh pihak pemberi wewenang atau *principle* kepada pihak yang diberi wewenang atau *agent*. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah keagenandalam sebuah organisasi pihak agen harus

transparan yang berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan. Transparansi memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah keagenan melalui *good governance*, dimana menurut OECD (2004) terdapat empat unsur penting dalam *good governance* yang wajib diimplementasikan dan dipahami dalam suatu organisasi jika ingin terselenggaranya *good governance* yang salah satunya yaitu transparansi.

Menurut Iswahyudi dkk. (2016) mengatakan bahwa prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*. Dengan adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik (Mustopa, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi dkk. (2016) menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap *good governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H1: Transparansi Sekolah Berpengaruh Positif terhadap *Good Governance* Sekolah

2.4.2. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap *Good Governance* Sekolah

Problem agensi muncul pada informasi yang tidak lengkap dapat berupa informasi tersembunyi (*hidden information*), artinya *principal* tidak sepenuhnya mengetahui kompetensi atau preferensi *agent* atau tuntutan yang tepat dari tugas yang diberikan dan atau tindakan tersembunyi (*hidden action*),

artinya principal tidak dapat sepenuhnya mengamati tindakan agent mereka (Strom, 2000). Menurut Kholmi (2010) bahwa akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya (Gray, dkk., 1987).

Menurut Wulandari (2009) akuntabilitas juga menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan *good governance*. Dalam disiplin akuntansi, akuntabilitas berarti tugas untuk menyediakan informasi (termasuk di dalamnya adalah informasi keuangan) atau kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi atau perusahaan (Gray dkk., 1996). Salah satu bentuk akuntabilitas *agent* kepada *principal* yaitu dengan membuat laporan keuangan, terlebih bagi organisasi sektor publik atau pemerintah yang memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara khusus adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Sari dan Amran, 2018). Oleh karena itu organisasi dituntut untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan (Andriansyah, 2013) bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Good Government Governance*.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika (2014) yang berjudul “*The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government Governance Research on Local Government Indonesia*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah fungsi audit intern memiliki efek positif pada kualitas pelaporan keuangan. Fungsi audit intern memiliki efek positif tentang Pemerintahan Pemerintah Baik. Dan, Kualitas pelaporan keuangan memiliki efek positif terhadap tata Pemerintahan yang Baik. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Nugraheni (2019) yang berjudul “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada *Good Government Governance* di Pemerintah Kabupaten Klaten” yang menunjukkan hasil bahwa Kualitas Laporan Keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Government*. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H2: Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Positif terhadap *Good Governance* Sekolah

2.4.3. Pengaruh Kualitas Komite sekolah terhadap *Good Governance*

Sekolah

Dalam teori agensi Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan yang diberikan oleh pihak pemberi wewenang atau *principle* kepada pihak yang diberi wewenang atau *agent*. Di dalam dunia persekolahan yang merupakan salah satu organisasi sektor publik,

teori keagenan memandang bahwa manajemen sekolah sebagai *agent* bagi masyarakat dimana masyarakat diwakilkan oleh organisasi independen yaitu Komite sekolah. Jadi yang berperan sebagai *principal* adalah Komite sekolah dan *agent* adalah manajemen sekolah.

Menurut Lena dan Karwanto (2013) upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud dengan adanya peran serta masyarakat di dalamnya. Wadah yang dapat menyalurkan aspirasi dari masyarakat tersebut adalah komite sekolah. Komite sekolah merupakan *partner* sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu (Sagala, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan sekolah menjadi lebih baik, oleh karena itu jika komite sekolah memiliki kualitas yang baik maka tata kelola dan penyelenggaraan sekolah pun akan menjadi lebih baik. Maka hipotesa yang dibangun adalah:

H3: Kualitas Komite sekolah Berpengaruh Positif terhadap *Good Governance Sekolah*

2.4.4. Pengaruh Partisipasi Komite sekolah terhadap *Good Governance Sekolah*

Menurut Scott (1997) mengatakan bahwa inti dari *agency theory* (teori keagenan) adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Berdasarkan teori agensi, dapat digambarkan bahwa hubungan komite sekolah sebagai organisasi perwakilan masyarakat dengan manajemen sekolah, yaitu

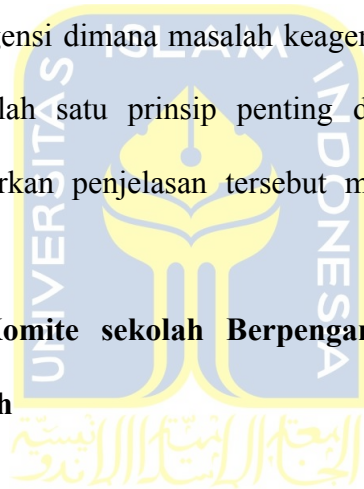
hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan masyarakat yang diwakilkan komite sekolah (sebagai *principal*) yang mendelegasikan wewenang kepada manajemen sekolah untuk menyelenggarakan sekolah dengan baik dan penuh tanggungjawab. Untuk menghindari terjadinya ketidakselarasan kepentingan komite sekolah dengan manajemen sekolah selaku *agent* maka diperlukan peran aktif dan partisipatif dari komite sekolah.

Keterlibatan komite sekolah beserta segenap orang tua murid sangat diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan sebagai kontributor eksternal dan salah satu sumber pendanaan sekolah (Wathon, 2016). Menurut Wathon (2016) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik, karena tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan sekolah ini akan memberi pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan Iswahyudi dkk. (2016) yang menguji pengaruh pemahaman akuntabilitas, pemahaman transparansi, pemahaman partisipasi masyarakat terhadap *good governance*, dan pemahaman *Value for Money* (VFM) terhadap *good governance* menghasilkan bahwa variabel partisipasi berpengaruh negatif terhadap *good governance*. Menurut Iswahyudi dkk (2016) itu disebabkan partisipasi masyarakat yang tinggi akan menjadikan pelaksanaan *good governance* menjadi menurun atau kurang baik, karena tidak efisien dalam biaya maupun pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan. Sehingga akan sulit mewujudkan suatu kebijakan yang memenuhi semua keinginan masyarakat, dan terdapatnya banyak hambatan dalam

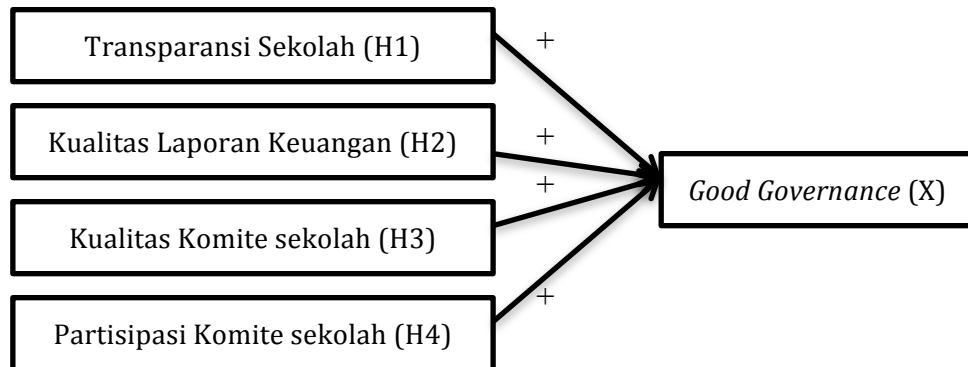
pelaksanaan program tersebut.

Namun peneliti tetap berhipotesis bahwa dalam *good governance* sekolah partisipasi komite sekolah sangat penting dan berbanding lurus dengan *good governance* sendiri. Karena Komite sekolah merupakan organisasi yang dibentuk sebagai perwakilan dari masyarakat, sehingga tidak semua masyarakat yang berada di sekitar sekolah tersebut akan berpartisipasi semua secara langsung dan tidak akan menyebabkan tidak efisien biaya maupun pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan. Selain itu berdasarkan teori agensi dimana masalah keagenan dapat diatasi dengan *good governance* dan salah satu prinsip penting dari *good governance* adalah partisipasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H4: Partisipasi Komite sekolah Berpengaruh Positif terhadap *Good Governance* Sekolah



2.5. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

3.1.1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah seluruh sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon. Sekolah menengah negeri di Kota Cirebon berjumlah 27, yaitu 18 SMP Negeri dan 9 SMA Negeri yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

3.1.2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Random Sampling* berupa teknik pengambilan sampel dengan kluster (*cluster sampling*). Teknik cluster sampling juga biasa disebut teknik kelompok atau teknik rumpun, teknik ini dilakukan dengan jalan memilih sampel yang didasarkan pada klasternya bukan individunya (Sukardi, 2013). Dalam penelitian ini, kluster berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Cirebon.

Tabel 3.1

Populasi SMPN dan SMAN di Kota Cirebon

Sekolah	Kecamatan	Peserta Didik
SMP Negeri 11 Kota Cirebon	Kesambi	1.097
SMP Negeri 4 Kota Cirebon	Kesambi	1.182
SMAN 2 Cirebon	Kesambi	1.201

SMAN 5 Cirebon	Kesambi	995
SMAN 7 Cirebon	Kesambi	1.140
SMP Negeri 12 Kota Cirebon	Harjamukti	616
SMP Negeri 17 Kota Cirebon	Harjamukti	624
SMP Negeri 7 Kota Cirebon	Harjamukti	1.024
SMP Negeri 6 Kota Cirebon	Harjamukti	1.036
SMP Negeri 8 Kota Cirebon	Harjamukti	833
SMP Negeri 9 Kota Cirebon	Harjamukti	886
SMAN 3 Cirebon	Harjamukti	1.074
SMAN 9 Cirebon	Harjamukti	752
SMP Negeri 1 Kota Cirebon	Kejaksan	1.195
SMP Negeri 2 Kota Cirebon	Kejaksan	808
SMP Negeri 5 Kota Cirebon	Kejaksan	938
SMAN 1 Cirebon	Kejaksan	1.235
SMAN 6 Cirebon	Kejaksan	1.092
SMP Negeri 10 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	845
SMP Negeri 13 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	692
SMP Negeri 14 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	577
SMP Negeri 15 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	679
SMP Negeri 16 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	761
SMP Negeri 18 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	294
SMP Negeri 3 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	723

SMAN 8 Cirebon	Lemahwungkuk	890
----------------	--------------	-----

Sumber: *dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id* (2020)

Berdasarkan populasi sekolah menengah negeri yang tercantum pada Tabel 3.1, selanjutnya dipilih dua SMPN dan SMAN dari masing-masing kecamatan berdasarkan jumlah peserta didik yang paling banyak sebagai sampel sekolah. Namun karena terdapat 1 (satu) kecamatan yang hanya memiliki 1 SMAN yaitu Kecamatan Lemahwungkuk maka perwakilan SMAN dari kecamatan tersebut hanya satu yaitu SMAN 8 Cirebon. Berikut daftar sekolah yang telah melalui tahap *cluster sampling*:

Tabel 3.2
Tabel Hasil Cluster Sampling

Sekolah	Kecamatan	Peserta Didik
SMP Negeri 11 Kota Cirebon	Kesambi	1.097
SMP Negeri 4 Kota Cirebon	Kesambi	1.182
SMAN 2 Cirebon	Kesambi	1.201
SMAN 7 Cirebon	Kesambi	1.140
SMP Negeri 7 Kota Cirebon	Harjamukti	1.024
SMP Negeri 6 Kota Cirebon	Harjamukti	1.036
SMAN 3 Cirebon	Harjamukti	1.074
SMAN 9 Cirebon	Harjamukti	752
SMP Negeri 1 Kota Cirebon	Kejaksan	1.195
SMP Negeri 5 Kota Cirebon	Kejaksan	938

SMAN 1 Cirebon	Kejaksan	1.235
SMAN 6 Cirebon	Kejaksan	1.092
SMP Negeri 10 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	845
SMP Negeri 16 Kota Cirebon	Lemahwungkuk	761
SMAN 8 Cirebon	Lemahwungkuk	890

3.1.3. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik dari populasi tersebut. Menurut Azwar (2010) sampel yang diambil haruslah representatif, artinya sampel harus mencerminkan dan memiliki sifat populasi. Untuk menentukan ukuran sampel responden dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin (1960) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : nilai kritis yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi)

Karena sampel responden dalam penelitian ini merupakan Komite sekolah, mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah pasal 4 ayat 2 “Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang”. Selanjutnya karena keterbatasan data sekunder mengenai jumlah pasti komite sekolah di Kota

Cirebon, maka diasumsikan jumlah komite sekolah pada masing-masing SMPN dan SMAN di Kota Cirebon sebanyak 15 orang, menyesuaikan dengan jumlah maksimal pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Maka jumlah populasi komite sekolah di Kota Cirebon sebanyak 405 orang (27 sekolah x 15 orang). Maka dalam pengambilan sampel responden pada penelitian ini, hasil yang diperoleh melalui perhitungan dengan nilai krisis (batas ketelitian) sebesar 10% adalah sebagai berikut

$$n = \frac{405}{1 + (405)(0.1)^2}$$

$$n = 80,19$$

Berdasarkan hasil di atas, maka jumlah sampel responden minimal adalah sebanyak 80 (dibulatkan).

3.2. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.2.1. Transparansi Sekolah

Menurut Athifah dkk, (2018) transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Sedangkan transparansi sekolah dapat diartikan bagaimana sekolah memberikan keterbukaan akses pada publik terkait pengelolaannya seperti dalam penyusunan RAPBS dan program kerja. Ginting (2018) dalam penelitiannya menggunakan indikator sebagai berikut untuk mengukur variabel transparansi sekolah:

- Sekolah transparan dalam menyusun RAPBS.

- Sekolah menyusun berbagai program kerja yang dapat diketahui oleh Komite sekolah dan publik.
- Sekolah memberikan informasi yang jelas tentang sumber keuangan sekolah kepada Komite sekolah.
- Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban yang dapat diketahui oleh publik.
- Laporan pertanggungjawaban dapat diterima dengan baik oleh publik.
- Sekolah tidak melanggar peraturan dalam mengelola keuangan sekolah.

Tabel 3.3
Kuisisioner Transparansi Sekolah

No.	Pernyataan	Sumber
1.	Sekolah transparan dalam menyusun RAPBS.	Ginting (2018)
2.	Sekolah membuat berbagai program kerja yang dapat diketahui oleh Komite sekolah dan publik.	Ginting (2018)
3.	Sekolah memberikan informasi yang jelas tentang sumber keuangan sekolah kepada Komite sekolah.	Ginting (2018)
4.	Sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban yang dapat diketahui oleh Komite sekolah maupun publik.	Ginting (2018)
5.	Laporan pertanggungjawaban keuangan dapat diterima dengan baik oleh publik	Ginting (2018)
6.	Sekolah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola keuangan sekolah.	Ginting (2018)

3.2.2. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan *Office of Government Commerce* (2009) kualitas secara umum didefinisikan sebagai totalitas fitur dan karakteristik yang melekat atau ditugaskan dari suatu produk, orang, proses, layanan dan / atau sistem yang menunjukkan kemampuannya bahwa ia memenuhi harapan atau memenuhi kebutuhan, persyaratan atau spesifikasi yang dinyatakan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 laporan keuangan memenuhi kualitas jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Fikrian, 2017). Jadi kualitas laporan keuangan merupakan kondisi laporan keuangan ketika memenuhi empat unsur kualitatif tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) indikator yang digunakan dalam mengukur variabel kualitas laporan keuangan adalah:

- 1) relevan,
- 2) andal,
- 3) dapat dibandingkan, dan
- 4) dapat dipahami.

Tabel 3.4

Kuisisioner Kualitas Laporan Keuangan

No.	Pernyataan	Sumber
1.	Laporan keuangan yang disusun memuat	Nugroho (2018)

	informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.	
2.	Laporan keuangan yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.	Nugroho (2018)
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.	Nugroho (2018)
4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa sesungguhnya.	Nugroho (2018)
5.	Informasi yang ada dalam laporan keuangan selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	Nugroho (2018)
6.	Format laporan keuangan yang disusun memiliki format yang sama setiap tahunnya.	Nugroho (2018)

3.2.3. Kualitas Komite sekolah

Kualitas komite sekolah merupakan kemampuan komite sekolah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan diatur. Menurut Kemendiknas (2002) bahwa komponen dan indikator kinerja Komite sekolah terkait pada peran yang dilakukannya, yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*). Komite sekolah yang baik adalah Komite sekolah yang melaksanakan perannya sesuai dengan

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- 2) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- 3) Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 4) Anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur penyelenggara sekolah yang bersangkutan.
- 5) Komite sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- 6) Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Tabel 3.5

Kuisisioner Kualitas Komite sekolah

No.	Pernyataan	Sumber
1.	Pembentukan komite sekolah dilakukan secara demokratis.	Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
2.	Tidak ada anggota komite sekolah yang berasal dari penyelenggara sekolah yang	Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

	bersangkutan.	
3.	Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.	Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
4.	Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan atau sumbangan.	Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
5.	Rapat komite sekolah rutin diadakan minimal sekali dalam satu semester.	Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016
6.	Terdapat pembinaan rutin bagi komite sekolah yang dilakukan oleh bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa.	Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

3.2.4. Partisipasi Komite sekolah

Partisipasi komite sekolah adalah suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, terlibat dalam perencanaan, pengawasan, maupun emosional demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan sekolah. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Dwiharja (2013) berikut indikator variabel partisipasi komite sekolah sebagai yang dapat dijadikan sebagai unsur pertanyaan pada kuisioner:

- 1) Komite sekolah turut diundang dan terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan APBS.

- 2) Komite sekolah dapat memberikan saran dan kritik untuk dijadikan pertimbangan untuk merevisi APBS.
- 3) Komite sekolah dapat menjelaskan arah kebijakan APBS yang direncanakan.
- 4) Komite sekolah mendapat informasi dari pihak sekolah dan terlibat dalam pengelolaan pembiayaan sekolah.

Tabel 3.6

Kuisisioner Partisipasi Komite sekolah

No.	Pernyataan	Sumber
1.	Komite sekolah turut diundang dalam penyusunan APBS	Wathon (2016)
2.	Komite sekolah dapat memberikan saran dan kritik untuk dijadikan pertimbangan untuk merevisi APBS	Wathon (2016)
3.	Komite sekolah dapat menjelaskan arah kebijakan APBS yang direncanakan.	Wathon (2016)
4.	Komite sekolah terlibat dalam pengelolaan pembiayaan sekolah	Wathon (2016)

3.2.1. Good Governance

Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, untuk mempertahankan kesatuan interaksi yang konstruktif antara domain dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Sedangkan menurut Punyaratabundhu

(2004) bahwa *good governance* mengacu pada penyelenggaraan sistem organisasi yang lebih mementingkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat dalam arti yang sangat luas yang dicirikan oleh adanya interaksi antarsistem yang kompleks yang menyangkut fungsi, tradisi, proses, dan struktur sumber daya yang dikarakterisasi oleh tiga kata kunci, yaitu: akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Good Governance memiliki tiga indikator dasar yang penting menurut Mardiasmo (2009) yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nugraheni (2019) dalam penelitiannya menggunakan tiga indikator berdasarkan Mardiasmo (2009) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sedangkan Kurniasari (2018) menggunakan indikator *good governance* dalam penelitiannya yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Oleh karena itu indikator dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator yang disebutkan oleh Mardiasmo (2009) ditambah indikator kesetaraan yang digunakan oleh Kurniasari (2018). Karena keempat hal tersebut sangat dekat dengan dunia sekolah.

Tabel 3.7

Kuisisioner *Good Governance*

No.	Pernyataan	Sumber
1.	Sekolah melibatkan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan.	Pengembangan dari Kurniasari (2019)
2.	Sekolah terbuka atas segala permasalahan yang wajib diketahui oleh publik.	Pengembangan dari Kurniasari (2018)

3.	Sekolah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	Pengembangan dari Kurniasari (2018)
4.	Sekolah dalam memberikan pelayanan selalu bersifat adil dan tidak membedakan.	Pengembangan dari Kurniasari (2018)

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner kepada para responden penelitian. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk menjawabnya. Kuisisioner yang dibagikan berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup dengan menyertakan alternatif pilihan jawaban, sehingga responden hanya memilih alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai (mungkin tidak tepat). Pilihan jawaban kuisisioner menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban yaitu, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (KS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skor pada masing-masing *item* dengan cara memberikan nilai 1 sampai dengan 5. Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5, Setuju (S) diberi nilai 4, Kurang Setuju (KS) diberi nilai 3, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda dapat digunakan untuk memperoleh

gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi sekolah, kualitas laporan keuangan sekolah, kualitas komite sekolah dan partisipasi komite sekolah terhadap *good governance* sekolah dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Berikut merupakan model regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = *Good Governance* Sekolah Menengah Negeri

α = Bilangan Konstanta

B1, B2, B3, B4, B5 = Koefisien regresi

e = Variabel pengganggu

X1 = Transparansi Sekolah

X2 = Kualitas Laporan Keuangan

X3 = Kualitas Komite sekolah

X4 = Partisipasi Komite sekolah

3.5. Uji Kualitas Data

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena tidak dianggap relevan (Umar, 2008). Validitas dalam hal ini merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan pengujian berbeda (Ghazali, 2001).

Uji validitas dihitung dengan menggunakan *pearson cerrelation* dan setelah dilakukan pengukuran dengan SPSS akan dilihat tingkat signifikansi dari semua pertanyaan atau pernyataan. Jika angka korelasi diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid.

3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Umar (2008) mengatakan bahwa Pengujian reabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Teknik statistika yang digunakan untuk pengujian ini dengan koefesien *cronbach's alpha* dengan bantuan SPSS. Menurut Ghozali (2011) suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.

3.6. Uji Asumsi Klasik

3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah ketika data terdistribusi normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, salah satu caranya yaitu dengan cara uji normalitas *Kormologorov-Smirnov* dengan melihat nilai signifikansi jika nilai signifikansi $> 0,5$ maka data penelitian

terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,5$ maka data tidak terdistribusi normal.

3.6.2. Uji Heteroskedastistas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2005). Salah satu cara untuk melihat apakah terjadi heteroskedastistas yaitu dengan melihat pola sebaran pada grafik *scatter plot*. Jika pada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastistas. Sedangkan jika sebaran titik-titik tidak jelas, maka tidak terjadi heteroskedastistas.

3.6.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (Husein, 2011). Salah satu cara untuk mendeteksi apakah terdapat multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat berdasarkan nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Jika nilai $VIF \leq 0,10$ dan nilai $tolerance \geq 0,10$ maka itu menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

3.7. Pengujian Hipotesa

3.7.1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Ginting, 2018). Jika R sama dengan 0, maka tidak

ada presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika R sama dengan 1 maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah nilai *Adjusted R Square* karena variabel independen lebih dari dua, dan nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model, tidak seperti *R Square* yang nilainya akan terus meningkat setiap tambahan satu variabel independen tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R square* dalam mengevaluasi mana model regresi terbaik (Sujianto, 2009).

3.7.2. Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2010). Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya nilai t hitung dengan memasukkan nilai hasil dari perhitungan regresi linier berganda dari program SPSS dengan ketentuan berikut:

- Jika $t_{table} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Karakteristik Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon dengan komite sekolah sebagai responden. Kuisisioner penelitian disebarakan kepada 15 Sekolah Menengah Negeri yang sudah dijadikan sampel berdasarkan *cluster sampling* yaitu 7 (tujuh) SMAN dan 8 (delapan) SMPN. Kuisisioner yang disebarakan sebanyak 80 buah pada 15 sekolah dan kuisisioner yang kembali sebanyak 55 yang digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.1.2. Karakteristik Responden

Berikut merupakan karakteristik dan latar belakang responden yang dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Responden Penelitian

Keterangan	Jumlah	Presentase
Usia:		
35-44	24	44%
45-54	28	51%
>54	3	5%
Pendidikan Terakhir:		
SD	-	-
SMP	-	-
SMA	8	15%
S1	40	73%
S2	6	11%
S3	1	2%
Lama Menjadi Komite		

sekolah:		
1-3 Tahun	40	73%
4-6 Tahun	15	27%

Dari total 55 orang responden dapat dilihat bahwa sebanyak 24 orang responden yang berusia antara 35-44 tahun atau 32%. Sedangkan usia antara 45-54 tahun sebanyak 28 orang atau 37%. Terakhir usia 54 tahun ke atas berjumlah 23 orang atau 31%.

Berdasarkan pendidikan dapat dilihat bahwa responden berpendidikan akhir SD dan SMP tidak ada. Responden dengan jenjang pendidikan terakhir SMA berjumlah 8 orang atau 15%. Responden dengan jenjang pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 40 orang atau 73%. Responden dengan jenjang pendidikan terakhir Magister sebanyak 6 orang atau 11%. Responden dengan jenjang pendidikan terakhir Doktor hanya 1 orang atau 2%.

Berdasarkan lama menjabat sebagai komite sekolah yaitu sebanyak 40 orang atau 73% menjabat antara 1-3 tahun. Sedangkan lama menjabat antara 4-6 tahun sebanyak 15 orang atau 27%.

4.2. Analisis Data

4.2.1. Uji Kualitas Data

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan data primer, oleh karena itu sebelum dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis maka perlu dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua uji ini harus

dilakukan untuk melihat apakah item pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur setiap variabel.

4.2.1.1. Uji Validitas

Pengujian validitas data ini menggunakan *software* statistik SPSS versi 25. Instrumen dapat dikatakan valid jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari angka kritik ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$). Berikut merupakan hasil dari uji validitas instrument penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Transparansi Sekolah (X1)	1	0,427	0,266	Valid
	2	0,645	0,266	Valid
	3	0,623	0,266	Valid
	4	0,594	0,266	Valid
	5	0,558	0,266	Valid
	6	0,626	0,266	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	1	0,572	0,266	Valid
	2	0,564	0,266	Valid
	3	0,547	0,266	Valid
	4	0,503	0,266	Valid
	5	0,692	0,266	Valid
	6	0,629	0,266	Valid
Kualitas Komite Sekolah (X3)	1	0,668	0,266	Valid
	2	0,654	0,266	Valid
	3	0,730	0,266	Valid
	4	0,696	0,266	Valid
	5	0,703	0,266	Valid
	6	0,596	0,266	Valid
Partisipasi Komite Sekolah (X4)	1	0,271	0,266	Valid
	2	0,731	0,266	Valid
	3	0,869	0,266	Valid
	4	0,716	0,266	Valid
Good Governance (Y)	1	0,562	0,266	Valid
	2	0,760	0,266	Valid
	3	0,762	0,266	Valid

	4	0,657	0,266	Valid
--	---	-------	-------	-------

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana konsistensi dari instrument penelitian. Menguji keandalan dan kekonsistenan pada instrument jika pengukuran tersebut diulang kembali. Hasil uji reliabilitas instrument penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Transparansi Sekolah (X1)	0,610	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0,615	0,60	Reliabel
Kualitas Komite sekolah (X3)	0,753	0,60	Reliabel
Partisipasi Komite sekolah (X4)	0,602	0,60	Reliabel
Good Governance (Y)	0,624	0,60	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.2. dapat disimpulkan bahwa lima instrument tersebut reliabel karena semua nilai *cronbach alpha* berada di atas batas reliabilitas (*cronbach alpha* > 0,60).

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan gambaran deskripsi data yang sudah dikumpulkan dari 55 kuisisioner yang disebar di 15 sekolah menengah negeri di Kota Cirebon. Berikut hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Deskripsi Hasil Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi Sekolah (X1)	55	24	30	26,35	1,719
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	55	24	30	27,07	1,752
Kualitas Komite sekolah (X3)	55	22	30	25,62	2,103
Partisipasi Komite sekolah (X4)	55	16	20	18,45	1,245
Good Governance (Y)	55	15	20	17,62	1,381

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel transparansi sekolah memiliki nilai *mean* sebesar 26,85. Karena jumlah butir item adalah enam maka didapatkan nilai rata-rata 4,47 (26,85 dibagi 6) Maka dari enam item kuisioner untuk transparansi sekolah rata-rata responden memilih setuju bahwa sekolah transparan dalam penyelenggaraannya. Dapat disimpulkan melalui hasil statistik deskriptif tersebut pihak sekolah telah melakukan transparansi dalam penyelenggaraannya.

Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai *mean* sebesar 27,07. Karena jumlah butir item adalah enam maka didapatkan nilai rata-rata 4,51 (27,07 dibagi 6). Maka dari enam item kuisioner kualitas laporan keuangan rata-rata responden memilih setuju bahwa sekolah membuat laporan keuangan dalam pertanggungjawabannya sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Variabel kualitas komite sekolah memiliki nilai *mean* sebesar 25,62. Karena jumlah butir item adalah enam maka didapatkan nilai rata-rata 4,27 (25,62 dibagi 6). Maka dari enam item kuisioner kualitas komite sekolah rata-rata

responden menjawab setuju bahwa komite sekolah memiliki kompeten dan melakukan tugasnya sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Variabel partisipasi komite sekolah memiliki nilai *mean* sebesar 18,45. Karena jumlah butir item adalah empat maka didapatkan nilai rata-rata 4,61 (18,45 dibagi 4). Maka dari empat item kuisioner partisipasi komite sekolah rata-rata responden memilih setuju bahwa komite sekolah sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan sekolah. Dapat disimpulkan bahwa sekolah telah melibatkan komite sekolah dalam penyelenggaraannya.

Variabel *good governance* memiliki nilai *mean* sebesar 17,62. Karena jumlah butir item adalah empat maka nilai rata-rata 4,40 (17,62 dibagi 4). Maka dari empat item kuisioner *good governance* rata-rata responden memilih setuju bahwa sekolah telah menyelenggarakan *good governance*.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan agar dapat mengetahui apakah sebaran data mengikuti atau mendekati normal. Salah satu uji normalitas yang dapat digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$). Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan *software* SPSS versi 25.

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Keterangan	Unstandardized Residual
N	55
Nilai Signifikansi	0,200

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 yang berarti nilainya lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa normalitas dalam model regresi ini sudah terpenuhi.

4.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (*varians inflation factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas, sedangkan sebaliknya jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas. Berikut dapat dilihat hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.6.

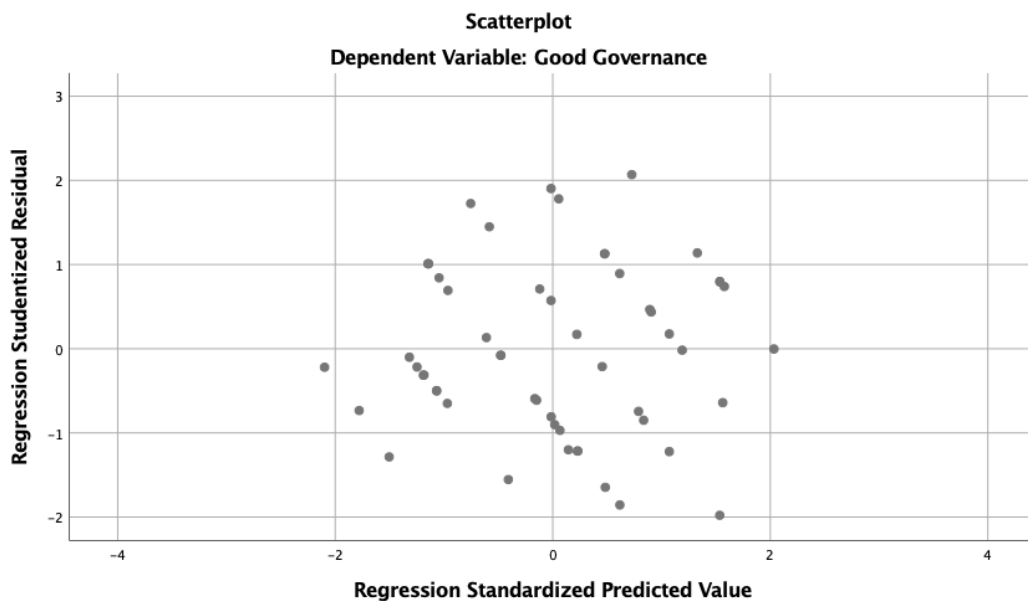
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Transparansi Sekolah	0,676	1,478
Kualitas Laporan Keuangan	0,504	1,986
Kualitas Komite sekolah	0,670	1,493
Partisipasi Komite sekolah	0,684	1,461

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas dapat dilihat bahwa setiap nilai *tolerance* dari variabel independen kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

4.4.3. Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastistas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu ketika tidak terjadi heteroskedastistas. Salah satu caranya yaitu dengan melihat pola sebaran titik-titik pada grafik *scatter plott*. Berikut merupakan grafik *scatter plott* model regresi penelitian.



Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pola sebaran titik-titik pada grafik *scatter plott* tidak memiliki pola yang jelas dimana titik-titik menyebar tidak beraturan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastistas.

4.5. Pengujian Hipotesis

Setelah model regresi diuji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa model dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hipotesis yang akan diuji yaitu pengaruh transparansi sekolah, kualitas laporan keuangan, kualitas komite sekolah dan partisipasi komite sekolah terhadap *good governance* sekolah baik secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis meliputi analisis dari koefisien determinasi dan uji t.

4.5.1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar presentase variasi variabel yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi semakin besar atau mendekati 100% maka semakin besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,849	0,721	0,699	0,758

Pada penelitian ini koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square* karena nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model, tidak seperti *R Square* yang

nilainya akan terus meningkat setiap tambahan satu variabel independen tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,699 yang berarti variabel dependen yaitu *good governance* (Y) dapat dijelaskan oleh variabel transparansi sekolah (X1), kualitas laporan keuangan (X2), kualitas komite sekolah (X3) dan partisipasi komite sekolah (X4) adalah sebesar 69,9 persen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 30,1 persen dijelaskan pada variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.5.2. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi yang dipilih. Dalam penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Maka jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 maka H_0 diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5 maka H_0 ditolak. Berikut hasil uji t yang telah dilakukan.

Tabel 4.8. Hasil Uji t

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-5,401	2,063		-2,619	0,12
Transparansi Sekolah (X1)	0,292	0,081	0,326	3,590	0,001
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0,252	0,083	0,319	3,032	0,004
Kualitas Komite sekolah (X3)	0,122	0,6	0,185	2,022	0,049
Partisipasi Komite sekolah (X4)	0,285	0,1	0,257	2,843	0,006

Berdasarkan 4.8 maka secara parsial pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel transparansi sekolah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,590 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel transparansi bernilai positif yaitu sebesar 0,292. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi sekolah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* (Y).
2. Variabel kualitas laporan keuangan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,032 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel kualitas laporan keuangan bernilai positif yaitu sebesar 0,252. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* (Y).
3. Variabel kualitas komite sekolah (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,022 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel kualitas komite sekolah bernilai positif yaitu sebesar 0,122. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas komite sekolah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* (Y).
4. Variabel partisipasi komite sekolah (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,843 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel

kualitas laporan keuangan bernilai positif yaitu sebesar 0,285. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi komite sekolah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* (Y).

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1. Pengaruh Transparansi Sekolah Terhadap *Good Governance*

Pengujian variabel transparansi sekolah terhadap variabel *good governance* dengan menggunakan uji t diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,590 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel transparansi bernilai positif yaitu sebesar 0,292. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu transparansi sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan Mardiasmo (2002) dimana terdapat sembilan prinsip yang salah satunya merupakan transparansi. Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 mengenai Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyebutkan terdapat lima tujuan *good governance* yang salah satunya merupakan birokrasi yang transparan. Oleh karena itu hal ini juga menunjukkan bahwa transparansi merupakan faktor yang penting dalam terwujudnya *good governance*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi dkk. (2016) yang meneliti mengenai pengaruh pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan *value for money* terhadap *good governance*, dimana hasil variabel transparansi juga berpengaruh terhadap *good governance*. Dengan adanya transparansi maka informasi dapat diakses oleh masyarakat yang akan menjadikan pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara sekolah semakin mudah.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah negeri di Kota Cirebon telah transparan dalam penyelenggaraannya. Dengan semakin transparan atau terbukanya pihak sekolah terhadap publik maka *good governance* pada sekolah menengah negeri akan terlaksana. Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi sekolah berpengaruh positif terhadap *good governance* yang artinya semakin tinggi transparansi sekolah menengah negeri di Kota Cirebon maka akan semakin tinggi juga *good governance* pada sekolah menengah negeri di Kota Cirebon.

Dengan hasil penelitian ini maka sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon harus tetap mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan informasinya kepada publik dan khususnya kepada komite sekolah sebagai organisasi yang mewakili masyarakat agar *good governance* sekolah terlaksana. Untuk meningkatkan transparansi, salah satunya sekolah dapat melakukannya dengan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawabannya di laman website sekolah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku institusi yang menaungi sekolah harus terus meningkatkan pengawasan terkait transparansi dan kebijakan yang mengharuskan sekolah transparan dalam penyelenggaraannya. Selain itu komite sekolah selaku perwakilan masyarakat yang juga *principal* juga harus partisipatif dan merespon upaya transparansi yang sudah dilakukan oleh sekolah.

4.6.2. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap *Good Governance*

Pengujian variabel kualitas laporan keuangan terhadap variabel *good governance* dengan menggunakan uji t diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,032 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel kualitas laporan keuangan bernilai positif yaitu sebesar 0,252. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa memang laporan keuangan yang disusun berdasarkan unsur-unsur kualitatifnya maka akan mendukung tercapainya *good governance*. Laporan keuangan merupakan dapat dikatakan merupakan bentuk suatu akuntabilitas dari sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Wulandari (2009) bahwa akuntabilitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan *good governance*.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah (2013) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap *Good Government Governance* Kota Bandung” yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap *good government governance*. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2019) yang berjudul “Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada *Good Government Governance* di Pemerintah Kabupaten Klaten” yang menunjukkan hasil bahwa Kualitas Laporan Keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Government*.

Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *good governance* yang artinya semakin tinggi kualitas laporan keuangan sekolah menengah negeri di Kota Cirebon maka akan semakin tinggi juga *good governance* pada sekolah menengah negeri di Kota Cirebon.

Dengan hasil penelitian ini maka sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon harus tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas agar *good governance* sekolah terlaksana. Salah satu cara untuk meningkatkan hal tersebut sekolah dapat memilih bendahara atau bagian keuangan sekolah yang memiliki latar belakang akuntansi, karena masih banyak sekolah yang memiliki bendahara dengan latar belakang atau tidak memiliki ilmu dalam bidang akuntansi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku institusi yang menaungi sekolah harus terus meningkatkan akuntabilitas sekolah terkait kualitas laporan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan membuat kebijakan baru seperti membuat peraturan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan khusus bagi sekolah negeri. Karena selama ini belum ada peraturan khusus yang mengatur laporan

keuangan untuk sekolah negeri. Saat ini sekolah hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu komite sekolah harus dapat memahami terkait laporan keuangan, oleh karena itu komite sekolah harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.

4.6.3. Pengaruh Kualitas Komite sekolah Terhadap *Good Governance*

Pengujian variabel kualitas komite sekolah terhadap *good governance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,022 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel kualitas komite sekolah bernilai positif yaitu sebesar 0,122. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu variabel kualitas komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan semakin berkualitasnya komite sekolah dalam arti komite sekolah melakukan tugasnya sesuai dengan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 maka *good governance* pada sekolah juga akan terwujud. Seperti yang dikatakan oleh Misbah (2009) bahwa komite sekolah dibentuk dengan maksud agar terdapat suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Oleh karena itu jika kualitas komite sekolah meningkat maka kualitas sekolah juga akan meningkat.

Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas komite sekolah berpengaruh positif terhadap *good governance* yang artinya semakin tinggi

kualitas komite sekolah menengah negeri di Kota Cirebon maka akan semakin tinggi juga *good governance* pada sekolah menengah negeri di Kota Cirebon.

Dengan hasil penelitian ini maka sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon harus tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas komite sekolah agar *good governance* sekolah terlaksana. Salah satu cara untuk meningkatkan hal tersebut sekolah dapat melakukan pemilihan komite sekolah secara demokratis sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan tidak ada anggota komite sekolah yang berasal dari penyelenggara sekolah agar komite sekolah dapat bertindak objektif dalam melakukan tugasnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku institusi yang menaungi sekolah juga harus turut serta meningkatkan kualitas dari komite sekolah, salah satunya dengan memberikan pelatihan rutin kepada komite sekolah. Karena bagaimanapun selain menjadi perwakilan masyarakat, komite sekolah juga merupakan tangan kanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam membantu pengawasan terhadap sekolah. Selain itu komite sekolah juga harus menyadari tanggungjawabnya dengan meningkatkan kualitasnya seperti memahami tugas, peran dan fungsi dari komite sekolah.

4.6.4. Pengaruh Partisipasi Komite sekolah Terhadap *Good Governance*

Pengujian variabel partisipasi komite sekolah terhadap *good governance* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,843 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004. Koefisien regresi dari variabel kualitas laporan keuangan bernilai positif yaitu sebesar 0,285.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yaitu variabel partisipasi komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* berdasarkan Mardiasmo (2002) dimana terdapat sembilan prinsip yang salah satunya merupakan partisipasi. Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance* memiliki arti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu disini komite sekolah sebagai organisasi perwakilan masyarakat merupakan sesuatu yang penting bagi penyelenggaraan sekolah yang baik, karena tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan sekolah ini dapat memberi pengaruh besar bagi kemajuan sekolah.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi dkk, (2016) yang berjudul “Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, *Value For Money* dan *Good Governance*” yang menyebutkan bahwa partisipasi berpengaruh secara negatif terhadap *good governance*. Penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Djamin (2015) yang berjudul “Partisipasi dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa” yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan meningkatkan *good governance*”.

Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah berpengaruh positif terhadap *good governance* yang artinya semakin tinggi partisipasi komite sekolah menengah negeri di Kota Cirebon maka akan

semakin tinggi juga *good governance* pada sekolah menengah negeri di Kota Cirebon.

Dengan hasil penelitian ini maka sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon harus tetap sadar bahwa sangat penting memberikan ruang partisipasi kepada komite sekolah, karena hal ini juga menunjukkan bahwa sekolah transparan. Karena dengan adanya partisipasi dari komite sekolah maka akan meningkatkan informasi yang masuk baik itu kritik maupun saran yang dapat menjadikan sekolah lebih berkembang.

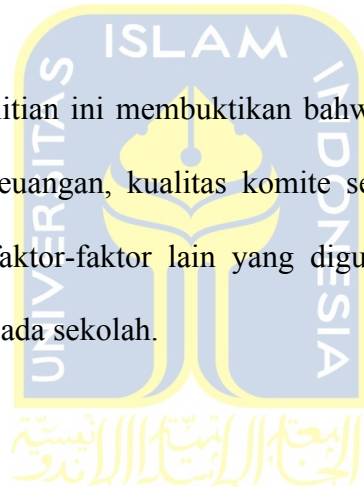
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku institusi yang menaungi sekolah juga harus turut serta dalam membangun partisipasi dari komite sekolah, salah satu caranya dengan memberikan pelatihan terkait pentingnya partisipasi dari komite sekolah. Selain itu komite sekolah juga harus memahami pentingnya partisipasi, baik itu bersifat material maupun non material.

4.6.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah diusahakan agar dilakukan dengan benar dan sesuai pedoman ilmiah. Namun penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya. Agar didapatkan hasil yang lebih baik, berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian:

1. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat dari para komite sekolah terhadap sekolahnya. Disini peneliti tidak dapat mengawasi apabila terdapat jawaban dari komite sekolah yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

2. Instrumen penelitian perlu dikembangkan lagi, karena masih sangat minimnya penelitian terdahulu terkait hubungan antara variabel independen dan dependen yang digunakan pada penelitian ini.
3. Jumlah sampel sekolah tidak sesuai dengan target yang seharusnya berjumlah 15 sekolah namun hanya 11 sekolah, sehingga jumlah responden pun hanya menjadi 55 orang. Hal ini disebabkan karena terdapat dua sekolah yang tidak mengizinkan dan dua sekolah yang terus mengulur waktu sampai waktu yang tidak ditentukan sehingga akhirnya sekolah diliburkan karena pandemi COVID-19.
4. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa selain transparansi sekolah, kualitas laporan keuangan, kualitas komite sekolah dan partisipasi komite sekolah terdapat faktor-faktor lain yang digunakan dalam studi mengenai *good governance* pada sekolah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Transparansi Sekolah, Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Komite sekolah dan Partisipasi Komite sekolah terhadap *Good Governance* Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* pada sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,590 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004.
2. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* pada sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 3,032 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004.
3. Kualitas komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* pada sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar sebesar 0,049 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,022 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004.

4. Partisipasi komite sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* pada sekolah menengah negeri yang ada di Kota Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$ dan nilai t hitung sebesar 2,843 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,004.

5.2. Saran

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen sebesar 69,9%. Bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti *responsiveness*, keadilan, *strategic vision*, dan sebagainya.
2. Penyebaran kuisioner dapat disertai dengan metode wawancara atau tatap muka secara langsung agar responden lebih memahami pernyataan dalam kuisioner yang disusun oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Peneliti juga sebaiknya melakukan pengamatan secara lebih mendalam dan menyeluruh di semua tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian.
3. Peneliti selanjutnya perlu menelaah dan mengembangkan instrument penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih tepat dan akurat.
4. Sekolah yang digunakan dalam penelitian selanjutnya lebih luas, karena penelitian ini hanya dilakukan pada tingkatan sekolah menengah negeri. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat memilih sekolah negeri di semua jenjang atau sekolah menengah tidak hanya negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Agus Eko Sujianto. (2009). *Aplikasi Statistik dengan SPSS*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Algameta, M. F. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Amran Fitri, E., Sari Novita, Y. (2018). *Analisis Atas Pelaporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Indovisi. 1 (1), 51-66.
- Amran, Elsa F., & Sari, Yesi N. 2018. *Analisis atas Pelaporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Indovisi. 1 (1), 51-66.
- Ardiansyah S., Yogi. (2013). *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Good Government Governance Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat)*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Arifin, Z. (2005). *Hubungan Antara Corporate Governance dan Variabel Pengurang Masalah Agensi*. Jurnal Studi Bisnis, 1 (10), 39-55.
- Arifin. (2005). *Peran Akuntansi dalam Menegakkan Prinsip Good Governance pada Perusahaan di Indonesia*. Makalah Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar.

- Athifah dkk. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur'an Nusantara*. Jurnal Perisai. 2 (1), 54-74,
- Ayub, R. Devia., Utama, M. Suyana., Wardana, I Gede. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Good Governance* Pada Pemerintah Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Universitas Udayana. 7 (4), 987-1022.
- Azwar, Saifuddin. (2010). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Budiasni, Ni Wayan N., Sanjaya, Ni Made W. S., Ayuni, Ni Made S. A. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi Jiwa Studi Kasus di AJB Bumiputera 1912 Cabang Singaraja*. Strengthening Economic for Global Competitiveness. 2, 349-360.
- Deden, S. (2008). *Manajemen Keuangan Sekolah*.
- Dwiharja, L., Mahendra. (2013). Pengaruh Partisipasi Komite sekolah Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (Studi Empiris pada Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Patrang Kabupaten Jember). Skripsi. Universitas Jember.
- Education Bureau. (2010). *Good Governance Quality Education: Participatory School Governance in the 21st Century*. Diakses pada 27 Desember 2019 dari <https://www.edb.gov.hk/attachment/en/sch-admin/sbm/corner-imsch/good%20governance.pdf>
- Endra Megiati, Yunita. (2016). *Pemberdayaan Komite sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya*. Jurnal SAP. 1 (2).

- Fama, F. F., & Jensen, M. C. (1983). *Separation of Ownership and Control*. *Journal of Law and Economics*, 26 (2), 301-325.
- Fikrian, Hafzan. (2017). *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. 4(1).
- Ghazali, Imam. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Ginting, F. B. Kuantha. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Sekolah-Sekolah di Kecamatan Medan Tuntungan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Gray et al. (1987). *Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristic: A Research Note and Extension*. *Journal of Business Finance and Accounting*. 28 (3), 327-356.
- Hasbullah. (2007). *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herawan. (2008). *Implementasi Good Governance untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada SMP Negeri 1 Lembang*. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*.
- Hudson, Christine. (2007). *Governance of Education: The State Strikes Back?*. *European Educational Research Journal*. 6 (3), 266-282.

- Husein, Umar. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., Achsin, M. (2016). *Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1 (2), 151-166.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. 8 (1).
- Kemendiknas. (2002). *Kemendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Kholmi, M. 2010. *Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi*. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 02 (02), 357-370.
- Kurniasari, Aprilia. (2018). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Penerapan Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Dinas Kabupaten Bantul)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Lena Marga, L., Karwanto.(2013). *Peran Komite sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di MI Negeri Nanggung Kabupaten Nganjuk*.Jurnal Manajemen Pendidikan. 1 (1).
- Lestari, Nunuk N. (2018). *Model Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Surakarta (Studi Kasus pada SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Misbah, M. (2009). *Peran dan Fungsi Komite sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan. 14 (1).
- Muhammad, H. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah(MBS)*. Direktorat Pembina Sekolah Menengah Pertama.
- Mustopa, Aldi M. (2017, November 12). *Melalui Transparansi Informasi publik*. Diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/mewujudkan-good-governance-melalui-transparansi-informasi-publik/>
- Ngisa. (2017). *Partisipasi Komite sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*.Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Nisbet, G. (2001). *Governance for Quality of Education*. Open Society with Institute For Educational Policy Hungary and The World Bank Group Washington D.C..20433, USA.

Nugroho, S., Bendhi.(2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nugraheni, A., Agustina (2019). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Implikasinya pada Good Government Governance di Pemerintah Kabupaten Klaten*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Organization for Economic Cooperation and Development. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. The OECD Paris.

Pangestika, F. (2016). *Pengendalian Internal, Good Governance, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Keuangan Kabupaten Temanggung*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 79.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Permadi, Ricky N. (2018, Mei 9). *Mewujudkan 'Good Governance' Melalui Inovasi*. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>

Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite sekolah.

Punyaratabandhu, Suchitra. (2004). *Commitment to Good Governance, Development and Poverty Reduction: Methodological Issues in the Evaluation of Progress at the National and Local Levels*. United Nation (UN).

Purba S., Irma. Djamin, Djanius. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik.3 (1), 25-36.

Purwandari, Erni. (2011). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Batang*. Tesis. Universitas Terbuka.

- Putra, G. Hendra. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat)*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang. 2(3).
- Rahman, Bujang. (2014). *Good Governance di Sekolah: Teori dan Praktik Menggairahkan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmatika, D Novianty. (2014). *The impact of internal audit function effectiveness on quality of financial reporting and its implications on good government governance research on local government indonesia*. *Journal of Finance and Accounting*. 5(18).
- Ramadani, Aziz. (2019, September 4). *MCW Beber Tiga Masalah Komite sekolah di Kota Malang Belum Maksimal*. Diakses dari <https://malangvoice.com/mcw-beber-tiga-masalah-komite-sekolah-di-kota-malang-belum-maksimal/>
- Ranson, S. (2011). *School Governance and the Meditation of Engagement*. *Journal of Educational Management Administration*. 39 (4), 398-4173.
- Rohayati, Tri. (2015). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Tesis. Universitas Lampung.
- Safitri, A., Wijaya, C., & Saputra, E. (2018). *Hubungan Antara Kerjasama Kepala Sekolah dengan Komite sekolah dan Kepuasan Kerja dengan*

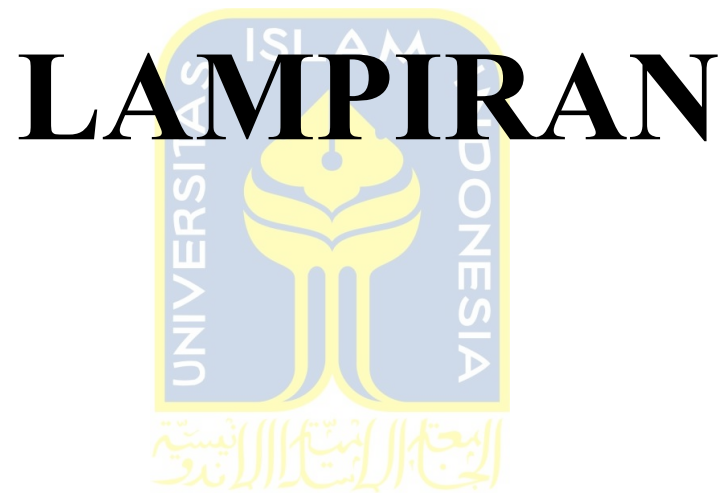
- Motivasi Kerja kepala Sekolah SMP Sekabupaten Aceh Tamiang*. Jurnal At-Tazakki, 2 (2).
- Sagala, Syaiful. (2010). *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Scott, R. W. (1997). *Financial Accounting Theory*. Prentice-Hall International, Inc.
- Sevilla et.al., (Slovin). (1960). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.
- Strom, K. (2000). *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracy*. European Journal of Political Research. 37 (3), 261-290.
- Sudiarianti, N. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sukhemi. (2011). *Analisis Pengaruh Penyajian Neraca Daerah, Aksesibilitas, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Magister Akuntansi UGM.
- Susanto B. (2005). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi, dan Partisipasi Komite sekolah terhadap Kinerja Sekolah*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. 7 (1).

- Sutedjo. (2009). *Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP Policy Paper.
- Wathon, S. Alfian. (2016). *Pengaruh Partisipasi Komite sekolah Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah*. Skripsi. Universitas Jember.
- Winarsunu, Tulus. (2002). *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Wulandari, Suci. (2009). *Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Jurnal Studi Akuntansi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 60-74.
- Zelmiyati, R. (2016). *Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan*. JRAK, 7 (1), 11-21.

Zuhro. (2010). *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*.Jurnal Penelitian Politik, 7.

Zulkifli (2015).*Komite sekolah Di Antara Cita dan Realita*.Jurnal Potensia. 14 (1).





KUISIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *GOOD GOVERNANCE* PADA SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA CIREBON

A. Identifikasi Responden

(Berilah tanda (√) pada kotak yang tersedia)

1. Umur:

<25 tahun 45-54 tahun
25-34 tahun >54 tahun

35-44 tahun

2. Jenis Kelamin :

Laki-Laki Perempuan

3. Lama Menjabat sebagai Komite Sekolah:

4. Pendidikan Terakhir:

SD SMP SMA S1 S2 S3

B. Cara Pengisian

Di bawah ini adalah pernyataan - pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Sekolah, Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Komite Sekolah, dan Partisipasi Komite Sekolah terhadap *Good Governance* di Sekolah. Bapak/ Ibu/ Saudara/I sebagai Komite Sekolah dimohon kesediaanya untuk memberikan jawaban atas pernyataan tersebut dengan cara memberi tanda ceklist (√) diantara pilihan jawaban yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

C. Variabel Penelitian

Transparansi Sekolah						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Sekolah transparan dalam menyusun RAPBS.					
2.	Sekolah menyusun berbagai program kerja yang dapat diketahui oleh Komite Sekolah dan publik.					
3.	Sekolah memberikan informasi yang jelas tentang sumber keuangan sekolah kepada Komite Sekolah.					
4.	Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan yang dapat diketahui oleh Komite sekolah maupun publik.					
5.	Laporan pertanggungjawaban keuangan dapat diterima dengan baik oleh publik					
6.	Sekolah tidak melanggar peraturan					

	perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola keuangan sekolah.					
Kualitas Laporan Keuangan						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Laporan keuangan yang disusun memuat informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2.	Laporan keuangan yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.					
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa sesungguhnya.					
5.	Informasi yang ada dalam laporan keuangan selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

6.	Format laporan keuangan yang disusun memiliki format yang sama setiap tahunnya.					
Kualitas Komite Sekolah						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara demokratis.					
2.	Tidak ada anggota Komite Sekolah yang berasal dari penyelenggara sekolah yang bersangkutan.					
3.	Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.					
4.	Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan atau sumbangan.					
5.	Rapat Komite Sekolah rutin diadakan minimal sekali dalam satu semester.					
6.	Terdapat pembinaan rutin bagi Komite Sekolah yang dilakukan oleh bupati/walikota, camat, lurah/kepala					

	desa.					
Partisipasi Komite Sekolah						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Komite sekolah turut diundang dalam penyusunan APBS					
2.	Komite Sekolah dapat memberikan saran dan kritik untuk dijadikan pertimbangan untuk merevisi APBS					
3.	Komite Sekolah dapat menjelaskan arah kebijakan APBS yang direncanakan.					
4.	Komite Sekolah terlibat dalam pengelolaan pembiayaan sekolah					
Good Governance						
No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Sekolah melibatkan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan.					
2.	Sekolah terbuka atas segala permasalahan yang wajib diketahui oleh publik.					
3.	Sekolah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.					

4.	Sekolah dalam memberikan pelayanan selalu bersifat adil dan tidak membedakan.					
----	---	--	--	--	--	--



DATA PENELITIAN

Tabel 1. Data Instrumen Variabel Transparansi Sekolah

NO. RESPONDEN	TRANSPARANSI SEKOLAH						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
1	5	4	4	4	4	4	25
2	5	4	4	4	4	5	26
3	5	4	4	4	4	5	26
4	5	5	4	4	4	5	27
5	4	4	4	4	4	4	24
6	5	5	5	5	4	5	29
7	5	4	5	4	4	5	27
8	5	4	4	5	4	5	27
9	5	4	4	5	5	5	28
10	4	5	4	5	4	5	27
11	5	5	5	5	4	5	29
12	5	5	4	4	4	5	27
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	4	5	5	4	5	28
15	5	5	5	4	4	5	28
16	5	4	4	4	4	5	26
17	5	4	4	4	4	5	26
18	5	5	5	4	4	5	28
19	4	4	4	4	4	5	25
20	5	4	4	4	5	5	27
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	4	4	4	4	4	25
23	5	4	4	4	4	4	25
24	5	5	5	4	4	5	28
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	4	4	4	4	4	25
27	5	4	5	4	4	4	26
28	5	4	4	4	4	4	25
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	4	4	5	5	5	28
31	5	4	4	4	5	5	27
32	5	4	4	5	5	5	28
33	5	4	4	4	4	5	26
34	5	5	5	5	5	5	30
35	5	4	4	4	4	5	26

36	5	4	4	5	5	5	28
37	5	5	5	4	5	5	29
38	5	5	5	4	5	5	29
39	5	4	4	4	4	5	26
40	5	4	4	5	4	5	27
41	5	4	5	5	5	4	28
42	5	4	4	4	4	4	25
43	5	4	5	4	5	5	28
44	5	4	4	4	5	5	27
45	4	4	5	5	5	5	28
46	5	4	4	5	4	4	26
47	5	5	4	5	4	5	28
48	5	5	5	5	4	5	29
49	5	4	4	4	4	5	26
50	5	4	4	4	4	5	26
51	5	4	5	5	4	4	27
52	5	4	5	4	4	5	27
53	5	4	4	4	4	5	26
54	5	4	4	4	5	5	27
55	5	5	4	5	5	5	29

Tabel 2. Data Instrumen Variabel Kualitas Laporan Keuangan

NO. RESPONDEN	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
1	5	4	4	4	4	4	25
2	5	5	4	4	4	4	26
3	5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	5	4	4	5	26
5	4	4	4	4	4	4	24
6	5	5	5	5	4	4	28
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24
9	5	5	4	4	4	4	26
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	4	4	5	5	5	27
15	5	5	4	5	5	4	28

16	5	4	5	5	5	5	29
17	5	5	5	4	5	5	29
18	5	5	5	5	5	5	30
19	4	5	5	5	4	4	27
20	5	5	5	4	4	5	28
21	4	4	5	4	4	4	25
22	4	4	4	5	4	4	25
23	4	4	5	5	4	4	26
24	4	4	5	5	4	5	27
25	4	4	5	4	4	4	25
26	4	4	4	5	5	5	27
27	4	5	5	5	5	5	29
28	4	5	4	5	5	4	27
29	4	4	4	5	4	4	25
30	4	5	5	4	5	4	27
31	4	4	5	4	4	4	25
32	4	4	4	5	5	4	26
33	4	4	5	5	4	4	26
34	5	5	4	5	4	4	27
35	4	5	4	4	4	4	25
36	4	5	5	5	5	4	28
37	5	5	5	5	4	4	28
38	5	5	5	5	5	4	29
39	4	5	5	5	5	4	28
40	4	4	5	5	5	4	27
41	4	5	5	4	5	5	28
42	4	4	4	5	4	5	26
43	5	5	5	5	5	5	30
44	5	4	5	5	5	5	29
45	5	5	5	5	5	5	30
46	4	5	5	4	5	5	28
47	5	5	5	5	5	5	30
48	5	5	5	4	4	5	28
49	4	5	5	4	4	4	26
50	4	5	5	4	4	4	26
51	5	4	4	5	5	4	27
52	5	4	4	5	5	4	27
53	4	5	5	5	4	4	27
54	5	4	4	4	5	5	27
55	5	4	4	4	5	5	27

Tabel 3. Data Instrumen Variabel Kualitas Komite Sekolah

NO. RESPONDEN	KUALITAS KOMITE SEKOLAH						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	4	4	4	3	23
2	5	4	4	4	4	3	24
3	5	4	4	4	4	3	24
4	5	5	3	4	5	4	26
5	4	4	3	4	4	3	22
6	5	4	4	5	4	4	26
7	5	4	3	4	4	4	24
8	4	5	4	4	4	3	24
9	4	4	4	5	4	4	25
10	4	4	4	4	5	3	24
11	5	5	5	4	4	3	26
12	4	5	4	4	4	3	24
13	5	5	5	5	5	3	28
14	4	4	5	4	5	3	25
15	5	4	4	4	4	4	25
16	5	4	5	5	4	4	27
17	5	5	5	4	4	4	27
18	5	5	5	4	5	4	28
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	5	5	4	5	4	28
21	4	5	4	5	5	5	28
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	4	5	5	5	3	27
25	4	3	4	4	4	4	23
26	5	4	4	4	4	4	25
27	5	4	5	4	4	4	26
28	5	4	4	4	4	4	25
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	5	5	5	4	4	28
31	4	4	5	4	4	4	25
32	5	4	5	4	4	4	26
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	5	4	4	4	4	25
35	5	4	4	4	4	4	25
36	5	5	5	5	5	5	30
37	5	5	5	5	5	5	30

38	5	5	5	5	5	5	30
39	5	5	5	5	5	4	29
40	5	5	5	5	5	4	29
41	5	5	5	5	5	5	30
42	4	4	5	4	4	5	26
43	5	5	5	4	4	4	27
44	5	5	5	4	4	4	27
45	5	4	5	5	5	4	28
46	4	4	4	5	4	4	25
47	5	4	4	5	4	4	26
48	4	5	4	4	4	3	24
49	4	4	4	4	4	3	23
50	4	4	4	4	4	3	23
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	4	4	4	4	4	3	23
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24

Tabel 4. Data Instrumen Variabel Partisipasi Komite Sekolah

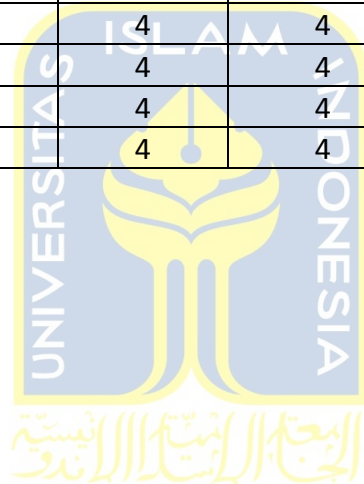
NO. RESPONDEN	PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH				TOTAL
	1	3	4	5	
1	5	4	5	5	19
2	5	4	5	5	19
3	5	4	5	5	19
4	5	5	5	5	20
5	5	4	4	4	17
6	5	5	5	4	19
7	5	4	4	4	17
8	5	4	4	4	17
9	5	5	4	4	18
10	5	4	4	4	17
11	5	5	5	5	20
12	5	4	4	4	17
13	5	5	5	5	20
14	5	4	4	4	17
15	5	4	4	4	17
16	5	4	5	5	19
17	5	4	5	5	19

18	5	5	5	5	20
19	5	5	4	4	18
20	5	5	4	5	19
21	4	4	4	4	16
22	5	4	4	5	18
23	5	5	4	4	18
24	5	5	5	5	20
25	5	4	4	4	17
26	5	5	5	5	20
27	5	5	5	5	20
28	4	5	5	5	19
29	4	5	5	5	19
30	5	5	5	5	20
31	5	5	4	4	18
32	5	5	4	4	18
33	5	4	4	4	17
34	5	5	5	4	19
35	4	4	4	4	16
36	5	5	5	4	19
37	5	5	5	5	20
38	5	5	5	4	19
39	5	4	4	4	17
40	5	4	4	4	17
41	5	5	5	4	19
42	4	4	4	4	16
43	5	5	5	4	19
44	5	5	5	4	19
45	5	5	5	5	20
46	4	5	5	5	19
47	5	5	5	5	20
48	5	4	4	5	18
49	5	4	4	4	17
50	5	4	4	4	17
51	5	5	5	5	20
52	5	5	5	5	20
53	5	5	4	4	18
54	5	5	5	4	19
55	5	5	5	4	19

Tabel 5. Data Instrumen Variabel *Good Governance*

NO. RESPONDEN	GOOD GOVERNANCE				TOTAL
	1	2	3	4	
1	5	4	4	4	17
2	5	4	4	4	17
3	5	4	4	4	17
4	5	5	4	4	18
5	4	3	4	4	15
6	5	5	4	5	19
7	5	4	4	4	17
8	5	4	4	4	17
9	5	5	4	4	18
10	4	5	4	4	17
11	5	5	5	5	20
12	5	4	4	4	17
13	5	5	5	5	20
14	5	4	4	4	17
15	4	4	4	5	17
16	5	4	5	5	19
17	5	4	5	5	19
18	5	5	5	5	20
19	5	5	4	4	18
20	5	4	5	5	19
21	4	3	4	4	15
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16
24	5	4	4	5	18
25	4	3	4	4	15
26	5	4	4	4	17
27	4	4	4	5	17
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	5	5	5	4	19
31	5	5	4	4	18
32	5	5	4	5	19
33	5	4	4	4	17
34	4	5	5	4	18
35	4	4	4	4	16
36	5	5	5	4	19
37	5	4	5	5	19

38	5	4	5	4	18
39	4	5	5	4	18
40	5	4	4	4	17
41	5	4	4	5	18
42	4	4	4	4	16
43	4	5	5	5	19
44	5	5	5	5	20
45	5	5	5	5	20
46	4	5	5	5	19
47	5	5	5	5	20
48	5	4	4	5	18
49	4	4	4	4	16
50	4	4	4	4	16
51	5	4	4	4	17
52	5	4	4	4	17
53	5	4	4	4	17
54	4	4	4	5	17
55	4	4	4	5	17



HASIL UJI INSTRUMEN

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Sekolah

		Correlations						
		TS1	TS2	TS3	TS4	TS5	TS6	TOTAL
TS1	Pearson Correlation	1	.111	.150	.048	.124	.278*	.427**
	Sig. (2-tailed)		.418	.274	.728	.365	.040	.001
	N	55	55	55	55	55	55	55
TS2	Pearson Correlation	.111	1	.443*	.242	.057	.358*	.645**
	Sig. (2-tailed)	.418		.001	.075	.678	.007	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
TS3	Pearson Correlation	.150	.443*	1	.227	.150	.141	.623**
	Sig. (2-tailed)	.274	.001		.096	.273	.306	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
TS4	Pearson Correlation	.048	.242	.227	1	.292*	.161	.594**
	Sig. (2-tailed)	.728	.075	.096		.030	.240	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
TS5	Pearson Correlation	.124	.057	.150	.292*	1	.282*	.558**
	Sig. (2-tailed)	.365	.678	.273	.030		.037	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
TS6	Pearson Correlation	.278*	.358*	.141	.161	.282*	1	.626**
	Sig. (2-tailed)	.040	.007	.306	.240	.037		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL	Pearson Correlation	.427*	.645*	.623*	.594**	.558*	.626*	1

Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
N	55	55	55	55	55	55	55

Tabel. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

		Correlations						
		KL1	KL2	KL3	KL4	KL5	KL6	TOTAL
KL1	Pearson Correlation	1	.320*	.000	.108	.272*	.298*	.572**
	Sig. (2-tailed)		.017	1.000	.434	.044	.027	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KL2	Pearson Correlation	.320*	1	.373*	.040	.166	.075	.564**
	Sig. (2-tailed)	.017		.005	.770	.226	.589	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KL3	Pearson Correlation	.000	.373*	1	.135	.134	.288*	.547**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.005		.324	.331	.033	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KL4	Pearson Correlation	.108	.040	.135	1	.390*	.090	.503**
	Sig. (2-tailed)	.434	.770	.324		.003	.512	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KL5	Pearson Correlation	.272*	.166	.134	.390**	1	.460*	.692**
	Sig. (2-tailed)	.044	.226	.331	.003		.000	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KL6	Pearson Correlation	.298*	.075	.288*	.090	.460*	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	.027	.589	.033	.512	.000		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55

TOTAL	Pearson Correlation	.572 [*]	.564 [*]	.547 [*]	.503 ^{**}	.692 [*]	.629 [*]	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Komite Sekolah

		Correlations						
		KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	TOTAL
KK1	Pearson Correlation	1	.354 [*]	.439 [*]	.366 ^{**}	.335 [*]	.229	.668 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.008	.001	.006	.013	.093	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KK2	Pearson Correlation	.354 [*]	1	.395 [*]	.271 [*]	.464 [*]	.185	.654 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.008		.003	.045	.000	.176	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KK3	Pearson Correlation	.439 [*]	.395 [*]	1	.378 ^{**}	.410 [*]	.269 [*]	.730 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001	.003		.004	.002	.047	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KK4	Pearson Correlation	.366 [*]	.271 [*]	.378 [*]	1	.507 [*]	.377 [*]	.696 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.006	.045	.004		.000	.004	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KK5	Pearson Correlation	.335 [*]	.464 [*]	.410 [*]	.507 ^{**}	1	.237	.703 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.013	.000	.002	.000		.082	.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
KK6	Pearson Correlation	.229	.185	.269 [*]	.377 ^{**}	.237	1	.596 ^{**}
	Sig. (2-tailed)							
	N	55	55	55	55	55	55	55

	Sig. (2-tailed)	.093	.176	.047	.004	.082		.000
	N	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL	Pearson Correlation	.668*	.654*	.730*	.696**	.703*	.596*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55	55	55

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Partisipasi Komite Sekolah

		Correlations				
		PK1	PK2	PK3	PK4	TOTAL
PK1	Pearson Correlation	1	.058	.032	-.045	.271*
	Sig. (2-tailed)		.674	.817	.745	.045
	N	55	55	55	55	55
PK2	Pearson Correlation	.058	1	.559**	.226	.731**
	Sig. (2-tailed)	.674		.000	.098	.000
	N	55	55	55	55	55
PK3	Pearson Correlation	.032	.559**	1	.582**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.817	.000		.000	.000
	N	55	55	55	55	55
PK4	Pearson Correlation	-.045	.226	.582**	1	.716**
	Sig. (2-tailed)	.745	.098	.000		.000
	N	55	55	55	55	55
TOTAL	Pearson Correlation	.271*	.731**	.869**	.716**	1
	Sig. (2-tailed)	.045	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55

Tabel 10. Hasil Uji Validitas *Good Governance* Sekolah

		Correlations				
		GG1	GG2	GG3	GG4	TOTAL
GG1	Pearson Correlation	1	.257	.178	.127	.562**
	Sig. (2-tailed)		.058	.192	.354	.000
	N	55	55	55	55	55
GG2	Pearson Correlation	.257	1	.494**	.259	.760**
	Sig. (2-tailed)	.058		.000	.056	.000
	N	55	55	55	55	55
GG3	Pearson Correlation	.178	.494**	1	.446**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.192	.000		.001	.000
	N	55	55	55	55	55
GG4	Pearson Correlation	.127	.259	.446**	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.354	.056	.001		.000
	N	55	55	55	55	55
TOTAL	Pearson Correlation	.562**	.760**	.762**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	55	55	55	55	55

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Sekolah

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.610	6

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.615	6

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Komite Sekolah

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	6

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Komite Sekolah

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.602	4

Tabel 15. Uji Reliabilitas Variabel *Good Governance* Sekolah

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	55	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	55	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.624	4

HASIL ANALISIS DATA

Tabel 16. Deskripsi Hasil Penelitian

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Transparansi Sekolah	55	24	30	26.85	1.545	
Kualitas Laporan Keuangan	55	24	30	27.07	1.752	
Kualitas Komite Sekolah	55	22	30	25.62	2.095	
Partisipasi Komite Sekolah	55	16	20	18.45	1.245	
Good Governance	55	15	20	17.62	1.381	
Valid N (listwise)	55					

Tabel 17. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.72960434
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.086
	Positive	.074
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 18. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.012		
	Transparansi Sekolah	.001	.676	1.478
	Kualitas Laporan Keuangan	.004	.504	1.986
	Kualitas Komite Sekolah	.049	.670	1.493
	Partisipasi Komite Sekolah	.006	.684	1.461

a. Dependent Variable: Good Governance

Tabel 19. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.849 ^a	.721	.699	.758

- a. Predictors: (Constant), Partisipasi Komite Sekolah, Kualitas Komite Sekolah, Transparansi Sekolah, Kualitas Laporan Keuangan
- b. Dependent Variable: Good Governance

Tabel 20. Hasil Uji t

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-5.401	2.063		-2.619	.012
	Transparansi Sekolah (X1)	.292	.081	.326	3.590	.001
	Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.252	.083	.319	3.032	.004
	Kualitas Komite Sekolah (X3)	.122	.060	.185	2.022	.049
	Partisipasi Komite Sekolah (X4)	.285	.100	.257	2.843	.006

a. Dependent Variable: Good Governance

SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS EKONOMI

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376, 883087;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 326/DEK/10/Div.URT/III/2020
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth
Pimpinan
Kesbangpol Kota Cirebon

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Muhamad Sidqi Naufal
No. Mahasiswa : 16312354
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor / 20 Mei 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Blok Dadap, Rt 04 Rw 01, Desa Babadan, Kecamatan Gunung Jati,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Good Governance pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon"

Dosen Pembimbing : Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2020

Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101



FAKULTAS
EKONOMI

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376, 883087;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 323/DEK/10/Div.URT/III/2020
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth
Pimpinan
Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Muhamad Sidqi Naufal
No. Mahasiswa : 16312354
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor / 20 Mei 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Blok Dadap, Rt 04 Rw 01, Desa Babadan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Good Governance pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon"

Dosen Pembimbing : Arief Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2020



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101



**FAKULTAS
EKONOMI**

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara Condong Catur Depok
Sleman Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376, 883087;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 324/DEK/10/Div.URT/III/2020
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth
Pimpinan
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Muhamad Sidqi Naufal
No. Mahasiswa : 16312354
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor / 20 Mei 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Blok Dadap, Rt 04 Rw 01, Desa Babadan, Kecamatan Gunung Jati,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Good Governance pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon"

Dosen Pembimbing : Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2020


Prof. Ika Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.,
NIK: 933130101



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Sasana Budaya Nomor. 184 Cirebon 45131
Telepon: (0231) 222796 Email: kesbangpolkotacirebon@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/595 -wasbang

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.

Memperhatikan :

Surat dari Universitas Islam Indonesia Nomor: 282/DEK/10/Div.URT/XII/2019. Yogyakarta, 09 Desember 2019. Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Administratif yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian / Survei / Riset / Pengambilan data / PKL dengan identitas :

Nama : MUHAMAD SIDQI NAUFAL
NIM/KTP : 16312354
Judul Penelitian : "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Good Governance pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon"
Penanggungjawab Kegiatan : Jaka Sriyana., M.Si., Ph.D
Lamanya Kegiatan : 06 Januari 2020 s/d 06 Februari 2020
Lokasi Kegiatan :

- Dinas Pendidikan Kota Cirebon
- Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat
- SMP N 1,4,5,6,7,10,11,16
- SMA N 1,2,3,6,7,8,9

Pengikut : -

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Melaporkan kedatangan dengan menunjukan Surat Keterangan Penelitian ini kepada Pejabat Setempat yang dituju;
2. Sepanjang Kegiatan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban;
3. Hasil kegiatan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain;
4. Setelah selesai, melaporkan hasil Keegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
5. Surat Keterangan Penelitian / Survei / Riset / Pengambilan data / PKL dinyatakan tidak berlaku bila ternyata pemegangnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 20 Desember 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI KOTA CIREBON



DALHARI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19620312 198903 1 016

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Cirebon (Sebagai Laporan)



Dipindai dengan CamScanner
Universitas Islam Indonesia



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono No.7 By-Pass Telp.(0231) 486579 Fax. (0231) 486296
Cirebon 45132

REKOMENDASI

Nomor : 848 / 0008 / Disdik

Memperhatikan surat dari Universitas Islam Indonesia Nomor : 285/DEK/10/Div.URT/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon Nomor : 070 / 595 – wasbang, tanggal 20 Desember 2019, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberi ijin kepada Saudara :


Nama : Muhamad Sidqi Naufal
NIM : 16312354
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Good Governance pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon”

Penanggungjawab : Jaka Sriyana, SE, M.Si, Ph.D
Waktu pelaksanaan : 06 Januari 2020 s.d 06 Februari 2020
Lokasi Kegiatan :
- Dinas Pendidikan Kota Cirebon
- SMP Negeri 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16

Dengan Catatan :

1. Berkoordinasi dengan Pejabat setempat yang dituju;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban;
3. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 3 Januari 2020
Kepala Dinas pendidikan
Kota Cirebon

H. IRAWAN WAHYONO, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19661210 198803 1008

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas UII Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
JL. DR. Cipto Mangunkusumo No. 99 Telp. (0231) 8804990 email : cabdin.wilx.disdikjabar@gmail.com
Kota Cirebon ☒ 45131

Cirebon, 20 Desember 2019

Nomor : 800 / 5407 - CADISDIK. Wil.X
Sifat : -
Lamp :
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Bandung Nomor :
286/DEK/10/Div.URT/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Permohonan Ijin
Penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MUHAMAD SIDQI NAUFAL
NIP : 16312354
Jurusan : Akuntansi
Tempat Penelitian : SMA Negeri 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Kota Cirebon
Judul Penelitian : *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Good Governance pada Sekolah Menengah Negeri di Kota Cirebon*

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X





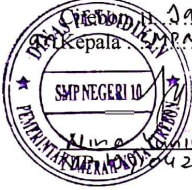
SRI LAKSANA, SE
Kepala Tk. I
NIP. 19651215 198601 2 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala SMA Negeri 1 Cirebon
2. Yth. Kepala SMA Negeri 2 Cirebon
3. Yth. Kepala SMA Negeri 3 Cirebon
4. Yth. Kepala SMA Negeri 4 Cirebon
5. Yth. Kepala SMA Negeri 5 Cirebon
6. Yth. Kepala SMA Negeri 6 Cirebon
7. Yth. Kepala SMA Negeri 7 Cirebon
8. Yth. Kepala SMA Negeri 8 Cirebon
9. Yth. Kepala SMA Negeri 9 Cirebon

BUKTI KUNJUNGAN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI
 “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI GOOD GOVERNANCE PADA
 SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI KOTA CIREBON”

<p>Cirebon, 10 Januari 2020 Kepala SMP NEGERI 11 Tati Sastrini, S.Pd NIP. 19881226 199803 2004</p>	<p>Cirebon, 10 Januari 2020 Kepala SMP NEGERI 1 Aman Darmawan, S.Pd NIP. 19801104 20031 200801 1004</p>
<p>Cirebon, 9 Januari 2020 Kepala SMA NEGERI 2 Andriani, S.Pd. NIP. 19890307 200902 2 006</p>	<p>Cirebon, 9 Januari 2020 Kepala SMP NEGERI 4 Dewi</p>
<p>Cirebon, 9 Januari 2020 Kepala SMA NEGERI 1 Dwi Nurani, S.Pd. NIP. 19650329 199303 100 5</p>	<p>Cirebon, 9 Januari 2020 Kepala SMA NEGERI 6 Wakaseh, Rehani, S.Pd., M.A. NIP. 19630700 198703 2008</p>
<p>Cirebon, 9 Januari 2020 Kepala SMP NEGERI 7 Sri Wahyuni, S.Pd NIP. 19770625 200609 2016</p>	<p>Cirebon, 9 Januari 2020 Kepala SMA NEGERI 5 Sohan Agdi, S.Pd NIP. 19810408 200604 1016</p>

<p>Cirebon, 10 Januari 2020 Kepala SMA N 8 Cirebon</p>  <p>Yanti Apriyanti, M.Pd. NIP. 04302007012015</p>	<p>Cirebon, 10 Januari 2020 Kepala SMP N 11 Cirebon</p>  <p>Agung Pratomo NIP. 03021520150110085</p>
<p>Cirebon, 10 Januari 2020 Kepala SMP Negeri 10 Cirebon</p>  <p>Alina Widiyanti, S.Pd. NIP. 04262014062001</p>	<p>Cirebon, 2020 Kepala</p> <p>_____</p> <p>NIP _____</p>
<p>Cirebon, 2020 Kepala</p> <p>_____</p> <p>NIP _____</p>	<p>Cirebon, 2020 Kepala</p> <p>_____</p> <p>NIP _____</p>
<p>Cirebon, 2020 Kepala</p> <p>_____</p> <p>NIP _____</p>	<p>Cirebon, 2020 Kepala</p> <p>_____</p> <p>NIP _____</p>